



LAPORAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Mimika
Tahun 2025





KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut menjadi semakin penting dalam berbagai tantangan dan dinamika pembangunan daerah, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun pengelolaan sumber daya yang menuntut tata kelola pemerintahan efektif, transparan, dan akuntabel. Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mimika memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 34,82 dengan predikat "Kurang". Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika masih perlu diperkuat, khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja organisasi. Kondisi ini menjadi bahan refleksi penting bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan, sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika selama tahun 2025, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi serta upaya perbaikan ke depan.

Pemerintah Kabupaten Mimika menyampaikan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan, kerja sama, dan sinergi yang telah terjalin dalam pelaksanaan pembangunan daerah sepanjang tahun 2025. Dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat merupakan modal penting dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Mimika yang maju, mandiri, dan sejahtera. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bersama dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mimika pada masa yang akan datang.

Timika, 13 Maret 2026
Bupati Kabupaten Mimika

Johannes Rettob



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ringkasan Eksekutif	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-2
1.2. Maksud dan Tujuan	I-4
1.3. Peran Strategis Kabupaten Mimika	I-4
1.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029	I-4
1.3.2. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022-204.....	I-5
1.3.3. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua tahun 2025-2029	I-6
1.4. Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Mimika tahun 2025	I-8
1.4.1. Permasalahan	I-8
1.4.2. Isu Strategis	I-10
1.5. Gambaran Umum Kabupaten Mimika	I-12
1.5.1. Kondisi Geografis	I-12
1.5.2. Kondisi Demografis	I-15
1.5.3. Pembangunan SUMBER Daya Manusia	I-17
1.5.4. Pendidikan	I-17
1.5.5. Kemiskinan	I-18
1.5.6. Ketenagakerjaan	I-19
1.5.7. Perekonomian	I-20
1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	I-23

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Perencanaan Strategis	II-2
2.1.1. RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024	II-2
2.1.2. RKPD Kabupaten Mimika tahun 2025	II-3
2.2. Perjanjian Kinerja Kabupaten Mimika tahun 2025	II-4
2.3. Metode Perhitungan Capaian Nilai Kinerja dan Nilai Kinerja Organisasi	II-6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2025	III-2
3.2. Nilai Kinerja Organisasi Kabupaten Mimika tahun 2025	III-3
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2025	III-5
3.3.1. Sasaran 1 "Meningkatnya Pemerataan Kualitas Kesehatan Masyarakat" ...	III-4
3.3.2. Sasaran 2 "Meningkatnya Kualitas Pemerataan Pendidikan Masyarakat" ..	III-8



3.3.3. Sasaran 3 "Meningkatnya Daya Beli Masyarakat"	III-11
3.3.4. Sasaran 4 "Meningkatnya Pengetahuan TIK Masyarakat"	III-14
3.3.5. Sasaran 5 "Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan"	III-17
3.3.6. Sasaran 6 "Menurunnya Tingkat Kemiskinan"	III-19
3.3.7. Sasaran 7 "Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat"	III-22
3.3.8. Sasaran 8 "Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat"	III-24
3.3.9. Sasaran 9 "Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman, Perhubungan, dan Perekonomian"	III-30
3.3.10. Sasaran 10 "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"	III-34
3.3.11. Sasaran 11 "Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi"	III-36
3.3.12. Sasaran 12 "Meningkatnya Profesionalitas Pegawai"	III-39
3.3.13. Sasaran 13 "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat"	III-42
3.3.14. Sasaran 14 "Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat"	III-44
3.3.15. Sasaran 15 "Meningkatnya Kesempatan Kerja"	III-45
3.3.16. Sasaran 16 "Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN"	III-47
3.3.17. Sasaran 17 "Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Berbasis Sektor Pertanian dan Perdagangan"	III-49
3.3.18. Sasaran 18 "Meningkatnya Akselerasi Pertumbuhan Sentra-Sentra Ekonomi di Pedalaman dan Pesisir"	III-51
3.4. Capaian Kinerja Anggaran Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2025	III-52
3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2025 ..	III-58

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	IV-2
4.2. Saran	IV-5

LAMPIRAN



Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Luas Wilayah, Jumlah Distrik, dan Jumlah Kampung Kabupaten Mimika Tahun 2025.....	I-13
Tabel 1.2.	Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten Provinsi Papua Tengah 2025.	I-17
Tabel 1.3.	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mimika, 2021–2025	I-19
Tabel 1.4.	Jumlah Angkatan Kerja Per Kabupaten di Papua Tengah Tahun 2025	I-20
Tabel 1.5.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika (miliar rupiah) 2020–2024	I-21
Tabel 1.6.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika (persen) 2020–2024	I-22
Tabel 2.1.	Tujuan Pembangunan	II-2
Tabel 2.2.	Sasaran Pembangunan	II-2
Tabel 2.3.	Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025	II-4
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Kabupaten Mimika Tahun 2025	II-5
Tabel 2.5.	Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	II-7
Tabel 2.6.	Matriks Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)	II-7
Tabel 2.7.	Predikat PKO	II-8
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2025.....	III-2
Tabel 3.2.	Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2025	III-4
Tabel 3.3.	Realisasi Anggaran Per-Sasaran.....	III-53
Tabel 3.4.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kabupaten Mimika Tahun 2025	III-59



Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Peta Pengembangan Wilayah Adat Mee Pago	I-6
Gambar 1.2.	Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	I-7
Gambar 1.3.	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Mimika	I-10
Gambar 1.4.	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Mimika	I-12
Gambar 1.5.	Peta Administratif Kabupaten Mimika	I-13
Gambar 1.6.	Peta Luas Wilayah Per Distrik Kabupaten Mimika	I-14
Gambar 1.7.	Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Mimika	I-15
Gambar 1.8.	Laju Pertumbuhan Penduduk dan Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2021-2025	I-15
Gambar 1.9.	Peta Jumlah Penduduk Per Distrik Kabupaten Mimika Tahun 2021-2025	I-16
Gambar 1.10.	Persentase Penduduk Kabupaten Mimika Menurut Jenjang Pendidikan	I-18
Gambar 1.11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025.....	I-19
Gambar 3.1.	Workshop Pencegahan Stunting di Kabupaten Mimika.....	III-7
Gambar 3.2.	Tingkatkan Pendidikan Berkualitas, Bupati Mimika Launching GDPP 2025–2045.....	III-10
Gambar 3.3.	Peringati Hari Pangan Sedunia, Dinas Ketahanan Pangan Mimika Gelar Gerakan Pangan Murah	III-13
Gambar 3.4.	Mimika Innovation Week 2025, Bappeda Gelar Seminar Peran Guru di Era Digital.....	III-15
Gambar 3.5.	Dinsos Gelar Paparan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Mimika.....	III-20
Gambar 3.6.	FKDM Gelar FGD Bahas Deteksi Dini Ancaman Keamanan di Mimika.....	III-23
Gambar 3.7.	Disparbudpora Mimika Gelar Festival Budaya Amungme dan Kamoro 2025	III-26
Gambar 3.8.	Mimika Perkuat Visi sebagai Kota Harmoni Lewat Kerukunan Umat Beragama	III-28
Gambar 3.9.	Pesparani II Jadi Momentum Perayaan Iman dan Persaudaraan.....	III-29
Gambar 3.10.	Dinas PUPR Mimika Gelar Konsultasi Publik I Penyusunan RDTR Kota Baru Kabupaten Mimika	III-31
Gambar 3.11.	Diskominfo Mimika Gelar Rapat Smart City III	III-33
Gambar 3.12.	Pemkab Mimika Luncurkan Program Mitra Hijau dan Sosialisasi Indeks Respon Lingkungan Hidup 2025	III-35
Gambar 3.13.	Bappeda Mimika Gelar Sosialisasi SIPETERATOR, Dorong Perencanaan Multisektoral Berbasis Data	III-37
Gambar 3.14.	Pemkab Mimika Sosialisasi Penguatan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.....	III-39
Gambar 3.15.	Pemkab Mimika tingkatkan profesionalisme ASN.....	III-41
Gambar 3.16.	Tingkatkan Kemudahan Layanan Masyarakat, 18 Juni 2025 Pemkab Mimika Luncurkan Mal Pelayanan Publik.....	III-43
Gambar 3.17.	Dekranasda Mimika Gelar Workshop dan Pelatihan Kerajinan.....	III-46
Gambar 3.18.	DPMPTSP Mimika Gelar FGD Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal	III-48
Gambar 3.19.	Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Jadi Fokus Penyusunan RKPD Pemkab Mimika Tahun 2025	III-50



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki sasaran strategis sebanyak 18 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 22 indikator. Pada tahun 2025, rata-rata capaian realisasi kinerja sebesar 48,90%. Terdapat 4 indikator dengan predikat Istimewa, 9 indikator dengan predikat Baik, 5 indikator dengan predikat Butuh Perbaikan, 4 indikator dengan predikat Kurang, 1 indikator berpredikat Sangat Kurang. Berikut ini merupakan infografis capaian realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2025.



Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki **capaian nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 34,82 atau berpredikat kurang**. Artinya, tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.

Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian 18 sasaran strategis sebesar Rp6.795.964.066.150,60 dengan realisasi sebesar Rp5.406.849.065.407,53 **atau sebesar 79,56%**.

Efisiensi penggunaan sumber daya Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar **negatif 37,10 pada tahun 2025**. Nilai efisiensi yang negatif tersebut menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sumber daya, khususnya anggaran, relatif lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja yang dihasilkan, sehingga efisiensi penyelenggaraan program dan kegiatan belum optimal.

Beberapa saran perbaikan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika ke depan diantaranya:

- 1) Memperkuat kualitas perencanaan kinerja dan penganggaran dengan memastikan keterkaitan yang lebih kuat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga seluruh kegiatan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama.
- 2) Meningkatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) agar alokasi anggaran lebih berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak pembangunan, bukan hanya pada penyerapan anggaran.



- 3) Melakukan fokus perbaikan pada indikator yang berpredikat Butuh Perbaikan, Kurang, dan Sangat Kurang, khususnya pada indikator pendidikan, investasi, reformasi birokrasi, profesionalitas aparatur, daya beli masyarakat, serta pertumbuhan sektor unggulan.
- 4) Memperkuat strategi pengembangan sektor ekonomi unggulan, terutama sektor pertanian dan perdagangan, melalui peningkatan produktivitas, penguatan rantai pasok, pengembangan hilirisasi komoditas, serta peningkatan akses pasar.
- 5) Meningkatkan daya tarik investasi daerah dengan memperbaiki iklim investasi, penyederhanaan perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung, serta promosi potensi investasi daerah secara lebih aktif.
- 6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan, literasi teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi aparatur guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
- 7) Memperkuat implementasi reformasi birokrasi dan SAKIP, melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja yang lebih akurat, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.
- 8) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, dengan melakukan evaluasi berkala terhadap program yang memiliki realisasi anggaran tinggi tetapi kontribusi kinerjanya rendah.
- 9) Mengoptimalkan pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran, sehingga realisasi anggaran dapat lebih merata dan mendukung percepatan pencapaian target pembangunan.
- 10) Meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan agar tidak terjadi duplikasi kegiatan serta dapat menghasilkan dampak pembangunan yang lebih signifikan.
- 11) Memperkuat sistem evaluasi kinerja berbasis data, termasuk pemanfaatan data statistik yang lebih akurat dan mutakhir untuk mendukung pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
- 12) Mendorong inovasi daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan, sehingga program yang dilaksanakan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

BAB 1

Pendahuluan





1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Mimika terus berkomitmen dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pencapaian target kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja tahun 2025. Tahun 2025 merupakan pondasi bagi upaya pencapaian target kinerja pembangunan jangka menengah yang ditetapkan melalui RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2025-2029 dan kinerja pembangunan jangka panjang yang ditetapkan melalui RPJPD Kabupaten Mimika tahun 2025-2045. Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki dedikasi untuk terus melakukan perbaikan kinerja dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah, implementasi program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran, serta evaluasi pelaksanaan kinerja secara transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi upaya sekaligus penguatan pondasi dasar dalam rangka pencapaian tata kelola Pemerintahan Kabupaten Mimika yang berorientasi pada pelayanan serta perwujudan kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.

Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai bagian dari unsur penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah. Pertama, Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kedua, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki capaian kinerja yang cukup baik pada tahun 2025, meskipun terdapat berbagai tantangan dan kendala dalam rangka pelaksanaan berbagai program serta kegiatan yang telah ditetapkan. Berbagai tantangan tersebut diantaranya adalah efisiensi anggaran, kapasitas sumber daya aparatur, dinamika kebijakan pusat dan daerah, koordinasi lintas jenjang pemerintahan dan lintas OPD, serta kondisi geografis dan topografi wilayah yang beragam. Namun, dalam berbagai tantangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan kinerja positif dengan capaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki visi "Terwujudnya Mimika yang Responsif, Energik, Transparan, Terampil, Obyektif dan Berdaya saing menuju: "GERBANG EMAS" (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera)." Visi tersebut diterjemahkan ke dalam enam misi yaitu: 1) Meningkatkan Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dan



Masyarakat yang handal, kreatif, inovatif dan produktif sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi; 2) Mewujudkan pelayanan birokrasi dan semangat aparatur birokrasi untuk pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Mimika melalui peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal serta membuka keterjangkauan publik pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar; 3) Mewujudkan keterbukaan informasi pelayanan publik dalam mengelola roda pemerintahan yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam Upaya meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan bagi kepentingan Masyarakat; 4) Mewujudkan Mimika yang sehat dengan transformasi Pembangunan infrastruktur, sosial dan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup sampai di seluruh pelosok; 5) Mewujudkan Mimika yang cerdas dengan meningkatkan kualitas Pendidikan sampai ke daerah terpencil dalam rangka meningkatkan indeks Pembangunan manusia; serta 6) Membuka pusat ekonomi baru dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran dan Pembangunan Mimika. Misi ini menjadi dasar perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.

Merujuk perjanjian kinerja tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki 18 sasaran sebagai berikut: 1) Meningkatnya pemerataan kualitas Kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan; 2) Meningkatnya pemerataan kualitas Pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks pendidikan; 3) Meningkatkan daya beli masyarakat dengan indikator Indeks pengeluaran; 4) Meningkatnya Pengetahuan TIK masyarakat dengan indikator IP TIK; 5) Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan dengan indikator IPG; 6) Menurunnya tingkat kemiskinan dengan indikator Angka kemiskinan; 7) Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat dengan indikator Angka Kriminalitas; 8) Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat dengan indikator Indeks Gotong Royong, Indeks rasa aman, dan Indeks Toleransi; 9) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman, perhubungan dan perekonomian dengan indikator Rasio Infrastruktur berfungsi baik, dan Rasio ketersediaan Infrastruktur; 10) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator IKLH; 11) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi dengan indikator Nilai SAKIP, dan Indeks Reformasi Birokrasi; 12) Meningkatnya Profesionalitas Pegawai dengan indikator Indeks Profesionalitas Aparatur; 13) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator IKM; 14) Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat dengan indikator Tingkat pendapatan masyarakat per kapita; 15) Meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator Tingkat pengangguran kerja; 16) Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN dengan indikator Nilai Investasi (PMDN/PMA); 17) Meningkatkan daya saing berbasis sektor unggulan dengan indikator persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perdagangan; serta 18) Meningkatkan akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir dengan indikator pertumbuhan sentra ekonomi pedalaman dan pesisir.

Laporan Kinerja merupakan wujud dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan dalam penggunaan anggaran. Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2025 terdapat beberapa aspek penting meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) yang memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tersebut. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2025 disusun mengacu pada perjanjian kinerja tahun 2025. Laporan kinerja merupakan bagian dari implementasi SAKIP. Oleh karenanya LAKIP tidak hanya berfungsi sebagai laporan kinerja, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Mimika tahun 2025 ini



berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan perwujudan birokrasi yang bersih, transparan, dan berkelas dunia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Mimika tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan akuntabel mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target sasaran selama tahun anggaran 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut.

- 1) Penyampaian informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dengan tujuan untuk memastikan transparansi atas pencapaian yang telah diraih serta target yang seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya secara optimal.

1.3. Peran Strategis Kabupaten Mimika

1.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 arah pembangunan nasional periode 2025–2029 berfokus pada penguatan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan wilayah yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing nasional di tengah dinamika global. RPJMN 2025-2029 juga menekankan pentingnya pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Arah pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam, penguatan industri hilir, serta pembangunan wilayah sebagai strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, Kabupaten Mimika memiliki posisi strategis karena wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar serta menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi di kawasan Papua. Keberadaan sektor pertambangan, jasa, perdagangan, serta aktivitas ekonomi turunan lainnya menjadikan Mimika sebagai salah satu penggerak utama perekonomian regional.

Kabupaten Mimika juga memiliki peran penting dalam mendukung agenda hilirisasi sumber daya alam yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2025–2029. Potensi sumber daya mineral yang dimiliki wilayah ini membuka peluang bagi pengembangan industri berbasis sumber daya alam yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi daerah. Dengan dukungan kebijakan nasional yang mendorong hilirisasi dan industrialisasi, Mimika berpotensi berkembang menjadi salah satu



pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Papua. Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas wilayah dalam RPJMN 2025–2029 juga memberikan peluang strategis bagi Kabupaten Mimika. Peningkatan infrastruktur transportasi, logistik, dan konektivitas wilayah akan memperkuat posisi Mimika sebagai simpul distribusi ekonomi di wilayah Papua Tengah. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan mobilitas barang dan jasa, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi di daerah.

Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, RPJMN 2025–2029 juga memberikan perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi peluang bagi Kabupaten Mimika untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia lokal agar mampu berpartisipasi secara optimal dalam aktivitas ekonomi daerah. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kabupaten Mimika diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 menunjukkan bahwa Kabupaten Mimika memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi ekonomi nasional, khususnya dalam pengembangan sektor berbasis sumber daya alam, peningkatan investasi, serta penguatan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Papua. Posisi tersebut menjadikan Kabupaten Mimika sebagai salah satu wilayah yang memiliki kontribusi penting dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional.

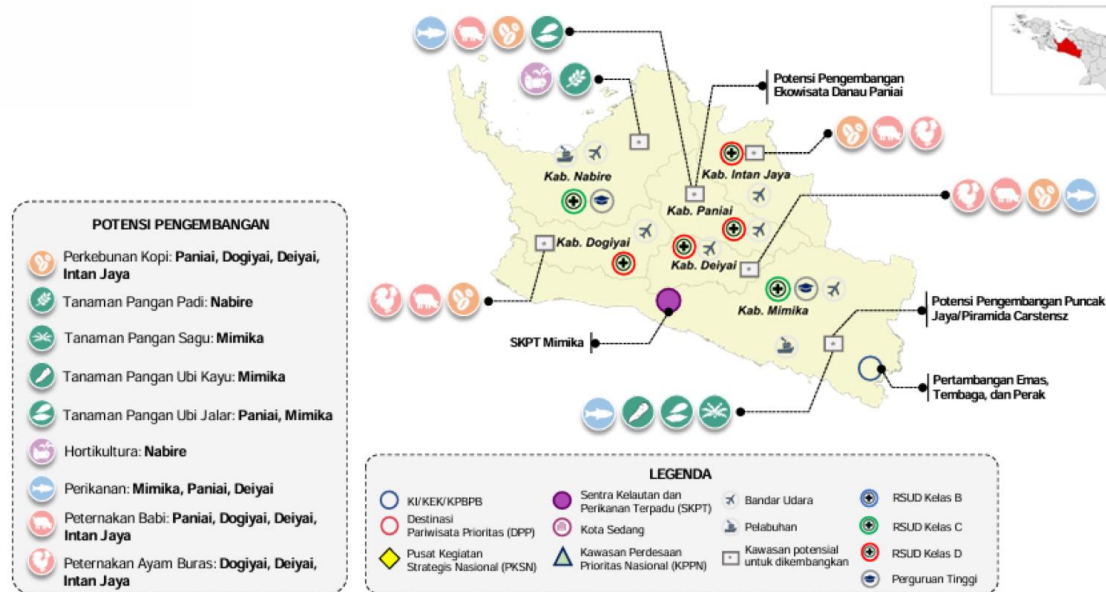
1.3.2. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022-2041

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2024, pemerintah menetapkan percepatan pembangunan Papua sebagai strategi untuk mewujudkan masyarakat Papua yang sehat, cerdas, dan produktif melalui penguatan pembangunan sumber daya manusia serta pengembangan sektor ekonomi unggulan wilayah. Kebijakan pembangunan tersebut menekankan pemanfaatan potensi sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal sebagai fondasi utama pembangunan Papua secara berkelanjutan. Merujuk pada arah pengembangan wilayah adat dalam RIPPP, pemerintah mengarahkan pembangunan wilayah Mee Pago sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi ekonomi strategis di Papua. Pengembangan wilayah tersebut diarahkan pada penguatan sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan, ekowisata, serta pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi daerah sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Papua.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan wilayah tersebut, Kabupaten Mimika memiliki posisi strategis karena wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar serta aktivitas ekonomi yang relatif berkembang dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. RIPPP menunjukkan bahwa Mimika memiliki potensi pengembangan pada sektor tanaman pangan seperti ubi kayu dan sagu, sektor perikanan, serta pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Potensi tersebut menunjukkan bahwa Mimika memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam serta penguatan ketahanan pangan di wilayah Papua. Merujuk pada potensi sumber daya alam yang dimiliki, Kabupaten Mimika juga memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor pertambangan mineral yang menjadi salah satu sektor ekonomi utama di Papua. Keberadaan potensi mineral seperti emas, tembaga, dan perak menjadikan wilayah Mimika sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi berbasis pertambangan yang memberikan kontribusi besar



terhadap perekonomian regional. Potensi tersebut membuka peluang bagi pengembangan industri hilirisasi mineral yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.



Gambar 1.1.

Peta Pengembangan Wilayah Adat Mee Pago

Sumber: RIPPP 2022-2041

Berdasarkan strategi pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam RIPPP, pemerintah juga mendorong pengembangan pusat kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai simpul perdagangan, jasa, serta distribusi logistik antarwilayah. Dalam konteks tersebut, Kabupaten Mimika memiliki peluang untuk berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Tengah karena didukung oleh aktivitas ekonomi yang berkembang, potensi sumber daya alam yang besar, serta konektivitas wilayah yang relatif baik. Merujuk pada tahapan pembangunan Papua hingga tahun 2041, pemerintah menekankan pentingnya penguatan ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor unggulan wilayah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam kerangka tersebut, Kabupaten Mimika memiliki peran penting sebagai salah satu daerah yang memiliki basis ekonomi kuat sehingga berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan Papua. Peran tersebut menunjukkan bahwa Mimika tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai wilayah yang mendukung percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi di Papua.

1.3.3. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua tahun 2025-2029

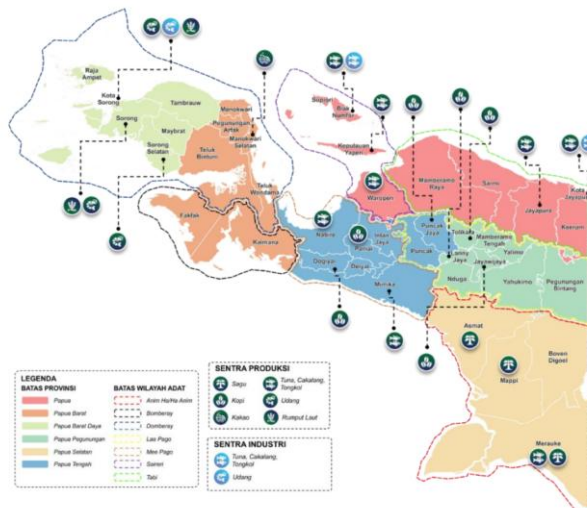
Berdasarkan RAPPP 2025–2029, percepatan pembangunan Papua pada periode 2025–2029 difokuskan pada pemerataan pembangunan wilayah dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah. Kebijakan pembangunan tersebut merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan wilayah Papua secara berkelanjutan dan selaras dengan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025–2029.



Merujuk arah pembangunan wilayah Papua dalam RAPPP, pemerintah mendorong pengembangan ekonomi wilayah melalui optimalisasi komoditas unggulan daerah, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta penguatan sektor industri berbasis sumber daya alam. Dalam konteks tersebut, wilayah Papua memiliki berbagai potensi ekonomi strategis yang meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta sektor pertambangan mineral yang menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi kawasan.

Berdasarkan potensi ekonomi wilayah Papua tersebut, Kabupaten Mimika memiliki peran strategis karena wilayah ini memiliki potensi sumber daya mineral yang sangat besar, khususnya pada komoditas emas, tembaga, dan perak. RAPPP menyebutkan bahwa wilayah Mimika memiliki cadangan mineral lebih dari dua miliar ton bijih yang menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi berbasis pertambangan di Papua. Potensi sumber daya mineral tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi regional serta mendukung pengembangan industri berbasis sumber daya alam di wilayah Papua. Selain sektor pertambangan, RAPPP juga menunjukkan bahwa Kabupaten Mimika memiliki potensi pengembangan pada sektor pertanian yang dapat mendukung ketahanan pangan wilayah Papua. Wilayah Mimika termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi produksi komoditas pangan seperti padi yang berperan dalam mendukung penguatan ketahanan pangan di kawasan Papua. Pengembangan sektor pertanian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi daerah sekaligus memperkuat sektor ekonomi berbasis potensi lokal.

Merujuk pada strategi percepatan pembangunan Papua dalam RAPPP, pemerintah juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan melalui peningkatan kapasitas petani dan nelayan, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi daerah melalui pengembangan sektor ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam konteks tersebut, Kabupaten Mimika memiliki peluang strategis untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui optimalisasi potensi pertanian, perikanan, serta kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam yang dimiliki daerah.



Gambar 1.2.

Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan

Sumber: RAPPP 2025-2029



Berdasarkan arah pembangunan wilayah Papua dalam RAPPP, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Mimika memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah Papua, khususnya melalui penguatan sektor pertambangan mineral, pengembangan sektor pertanian sebagai pendukung ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan daerah. Peran tersebut menunjukkan bahwa Mimika menjadi salah satu wilayah yang memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan Papua.

1.4. Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Mimika tahun 2025

1.4.1. Permasalahan

Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki beberapa permasalahan dalam melaksanakan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan diantaranya:

1) Belum Optimalnya Peningkatan Kapasitas SDM berbasis IPTEK

Upaya peningkatan kapasitas SDM berbasis IPTEK di Kabupaten Mimika masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala seperti belum meratanya layanan pendidikan, rendahnya penguasaan teknologi, tingginya angka putus sekolah, daya saing pendidikan yang masih rendah, minimnya pemberdayaan gender dalam pembangunan, serta masih tingginya ketergantungan penduduk terhadap alam.

2) Belum Optimalnya Pemenuhan Layanan Dasar

Pemerintah Kabupaten Mimika menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi geografis dan topografis wilayah. Hal ini berdampak pada jangkauan layanan dasar kesehatan dan pendidikan masih belum merata ke seluruh wilayah kampung. Selain itu, jaminan dan perlindungan sosial penduduk masih belum merata. Dalam upaya pemenuhan layanan dasar Pemerintah Kabupaten Mimika juga menghadapi kendala berupa tinggi risiko bencana dan minimnya ketersediaan sumber pangan berkelanjutan.

3) Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah di Kabupaten Mimika masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Luasnya wilayah menyebabkan masih terdapat area yang luput dari pengawasan aparat keamanan, sementara kondisi sosial masyarakat serta pengaruh budaya masa lalu turut memengaruhi dinamika keamanan di lingkungan masyarakat. Di sisi lain, masih sering terjadi kasus kekerasan dan tindak kriminal yang menunjukkan bahwa pemeliharaan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat belum berjalan optimal, termasuk dalam penanganan pelanggaran ketertiban dan upaya pencegahan gangguan keamanan lingkungan. Selain itu, masih tingginya konflik sosial antar kelompok masyarakat menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih rentan terhadap potensi konflik. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya pelestarian dan pembinaan kebudayaan lokal yang berperan dalam memperkuat kohesi sosial. Di samping itu, terdapat pula potensi risiko disintegrasi sosial yang dipengaruhi oleh rawannya pergerakan organisasi terlarang serta munculnya berbagai provokasi negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.

4) Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah yang Belum Merata

Permasalahan infrastruktur dan konektivitas wilayah di Kabupaten Mimika masih ditandai dengan belum meratanya pembangunan infrastruktur yang mendukung keterhubungan antar wilayah. Kondisi geografis yang cukup menantang



menyebabkan pembangunan dan jangkauan infrastruktur dasar belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal, khususnya daerah pelosok dan pinggiran. Hal ini berdampak pada masih terbatasnya aksesibilitas antar wilayah, minimnya moda transportasi penghubung antar daerah, serta belum meratanya jaringan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat dan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur masih relatif terbatas sehingga memperlambat percepatan pembangunan infrastruktur wilayah. Selain itu, masih terdapat cukup banyak desa tertinggal yang disebabkan oleh keterbatasan akses pembangunan akibat kondisi geografis serta minimnya jangkauan informasi dan sarana prasarana dasar di wilayah perdesaan. Pembangunan rumah layak huni dan fasilitas dasar masyarakat juga belum merata, sementara ketersediaan layanan dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi, serta pengelolaan sampah dan limbah masih terbatas. Kondisi tersebut turut berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, termasuk meningkatnya volume sampah rumah tangga, terbatasnya fasilitas pengolahan sampah dan limbah, serta belum optimalnya pengelolaan sanitasi dan air minum layak bagi seluruh masyarakat.

5) Belum Optimalnya Penerapan Reformasi Birokrasi

Permasalahan reformasi birokrasi di Kabupaten Mimika masih ditandai dengan belum optimalnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja pemerintahan. Hal ini tercermin dari masih belum maksimalnya penyerapan anggaran belanja daerah serta belum optimalnya penerimaan pajak, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah. Selain itu, dukungan data statistik pembangunan yang belum mencakup seluruh sektor serta masih terbatasnya sistem pengaman dan pengelolaan informasi turut memengaruhi kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan juga masih menghadapi tantangan dari aspek kapasitas dan profesionalisme aparatur. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penguatan reformasi birokrasi masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan sistem informasi dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

6) Masih Rendahnya Daya Saing Ekonomi Daerah

Permasalahan daya saing ekonomi daerah di Kabupaten Mimika masih ditandai dengan belum optimalnya produktivitas sektor-sektor ekonomi unggulan, khususnya sektor pertanian dan kehutanan yang seharusnya berperan penting dalam pembentukan PDRB daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan serta tingginya aktivitas pembukaan lahan, sementara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti daerah tangkapan sungai dan danau belum berjalan optimal. Di sisi lain, pengembangan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal juga masih menghadapi berbagai kendala, antara lain terbatasnya akses pasar, rendahnya akses pembiayaan ke lembaga keuangan, serta lemahnya kelembagaan dan pemberdayaan koperasi yang belum berperan maksimal dalam mendukung kegiatan usaha masyarakat. Selain itu, potensi ekonomi daerah seperti perikanan, pariwisata, dan budaya lokal belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan daya saing daerah.



Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi serta masih terbatasnya infrastruktur pendukung investasi dan perizinan turut menjadi kendala dalam pengembangan sektor ekonomi unggulan. Kondisi tersebut berdampak pada masih minimnya investasi di daerah serta kualitas dan kapasitas tenaga kerja lokal yang relatif rendah, sehingga belum mampu bersaing secara optimal dalam pasar kerja dan kegiatan ekonomi yang berkembang di Kabupaten Mimika.



Gambar 1.3.

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Mimika

1.4.2. Isu Strategis

Pemerintah Kabupaten Mimika telah mengidentifikasi beberapa isu strategis pembangunan daerah diantaranya:

1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mimika diarahkan pada penguatan akses dan mutu pendidikan yang merata, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penurunan angka putus sekolah guna meningkatkan daya saing pendidikan masyarakat. Upaya ini juga mencakup penguatan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan struktur ekonomi. Dengan demikian, pembangunan SDM diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih produktif, inovatif, dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional.

2) Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pemenuhan Layanan Dasar

Pemerataan layanan dasar di Kabupaten Mimika difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, serta jaminan perlindungan sosial secara lebih merata hingga ke wilayah kampung dan daerah terpencil. Upaya tersebut diarahkan pada penguatan sistem pelayanan dasar yang mampu



menjangkau seluruh lapisan masyarakat meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi geografis dan topografis wilayah. Selain itu, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana serta penguatan ketersediaan sumber pangan yang berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3) Penguatan Stabilitas Keamanan dan Kondusivitas Wilayah

Penguatan kondusivitas wilayah diarahkan pada peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan sistem pengawasan wilayah, peningkatan kapasitas aparat keamanan, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan. Selain itu, pengendalian konflik sosial antar kelompok masyarakat perlu dilakukan melalui penguatan kohesi sosial, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta peningkatan dialog dan partisipasi masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Upaya ini juga mencakup peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu stabilitas wilayah, sehingga tercipta kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif untuk mendukung pembangunan daerah.

4) Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

Pemerataan infrastruktur diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang mampu meningkatkan keterhubungan antar wilayah, khususnya di daerah perdesaan, wilayah terpencil, dan kawasan yang masih memiliki keterbatasan akses pembangunan. Pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada peningkatan aksesibilitas transportasi, tetapi juga pada penyediaan layanan dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi, perumahan layak huni, serta sistem pengelolaan sampah dan limbah yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur menjadi langkah penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat.

5) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Upaya ini mencakup optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, serta penguatan sistem data dan informasi pembangunan yang terintegrasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.

6) Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal

Peningkatan daya saing ekonomi daerah diarahkan pada penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pengembangan UMKM dan koperasi juga perlu diperkuat melalui peningkatan akses pembiayaan, perluasan pasar, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Selain itu, peningkatan investasi daerah perlu didorong melalui perbaikan iklim usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kualitas tenaga kerja lokal yang lebih kompeten dan produktif. Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah



diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1.4.

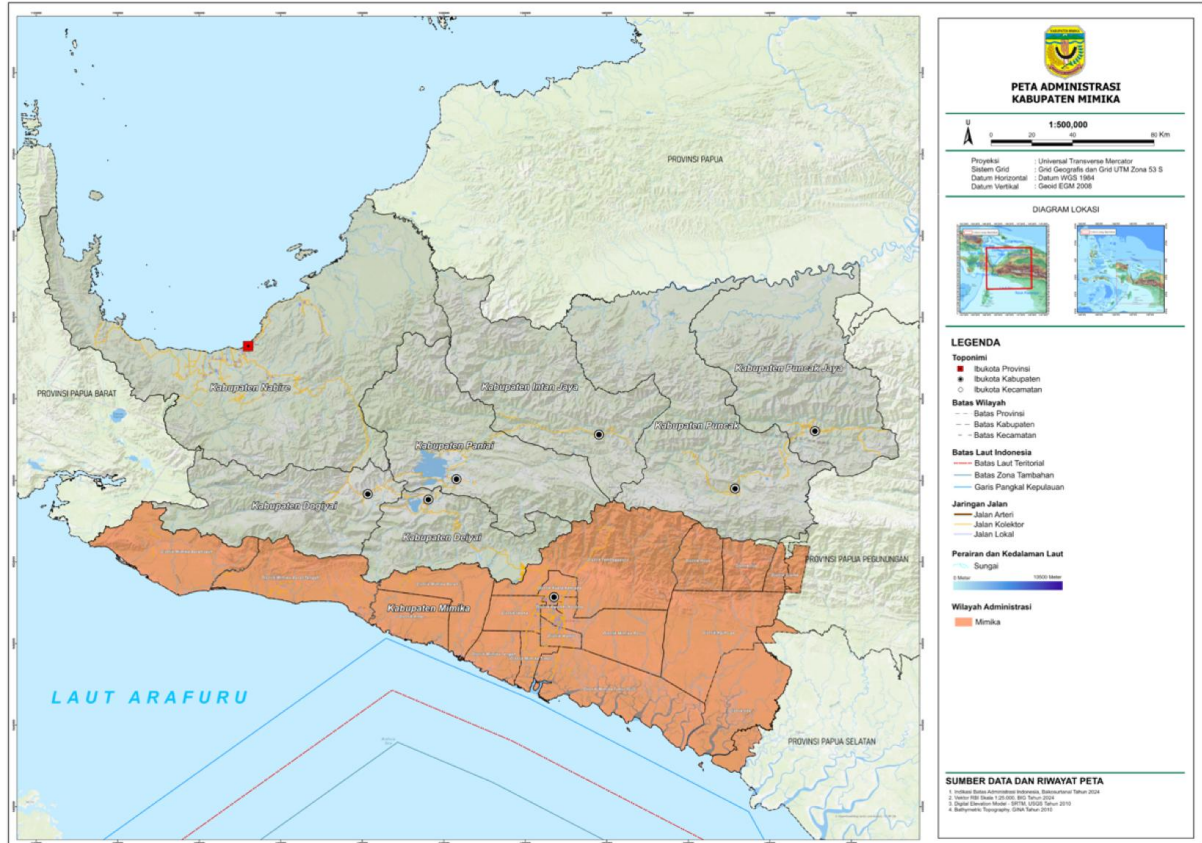
Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Mimika

1.5. Gambaran Umum Kabupaten Mimika

1.5.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Mimika pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Fakfak sebelum secara resmi berdiri sendiri pada tahun 1999. Kabupaten Mimika, yang beribu kota di Timika, terletak antara 134°31' - 138°31' Bujur Timur dan 4°60' - 5°18' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik yang memiliki topografi dataran tinggi meliputi Tembagapura, Agimuga, Hoya, Alama, dan Jila. Sementara itu, distrik-distrik selain lima distrik tersebut memiliki topografi dataran rendah. Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, Hoya, Alama, Agimuga, dan Jila adalah distrik-distrik yang tidak memiliki pantai. Sebaliknya, Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Amar, dan Jita sebagian wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik tersebut memiliki pantai. Kabupaten Mimika berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

- Bagian barat berbatasan dengan Provinsi Papua Barat
- Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan.
- Bagian selatan berbatasan dengan Laut Arafura
- Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Puncak Jaya



Gambar 1.5.

Peta Administratif Kabupaten Mimika
Sumber: : Satu Peta Indonesia 2026, diolah

Kondisi geografis Kabupaten Mimika juga menyimpan kekayaan berupa kandungan emas dan mineral. Tambang Grasberg merupakan salah satu lokasi eksplorasi dan eksploitasi emas yang berada di kawasan pegunungan dan termasuk dalam wilayah Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika memiliki topografi yang lengkap, mulai dari dataran tinggi Pegunungan Jayawijaya hingga dataran rendah di pesisir selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Arafura.

Tabel 1.1

Luas Wilayah, Jumlah Distrik, dan Jumlah Kampung Kabupaten Mimika Tahun 2025

Distrik	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa
Agimuga	Kiliarma	2198,56	8
Amar	Amar	1801,5	6
Alama	Alama	365,92	11
Hoya	Hoya	563,78	6
Iwaka	Iwaka	492,73	7
Jila	Jila	622,83	12
Jita	Sempan Timur	1962,33	10
Kuala Kencana	Kuala Kencana	860,74	10
Kwamki Narama	Harapan	12,86	10



Distrik	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa
Mimika Barat	Kokonao	1187,85	7
Mimika Barat Jauh	Potowayburu	2485,89	5
Mimika Barat Tengah	Kapiraya	2292,46	9
Mimika Baru	Timika	1509,48	14
Mimika Tengah	Atuka	526,67	5
Mimika Timur	Mapuru Jaya	290,48	6
Mimika Timur Jauh	Ayuka	2035,36	5
Tembagapura	Tembagapura	2586,86	14
Wania	Kamoro Jaya	197,32	7
Mimika		21693,51	152

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2026

Kabupaten Mimika memiliki luas wilayah total sebesar 21.693,51 km² dan terbagi ke dalam 18 Distrik. Dari 18 distrik di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Barat Jauh memiliki wilayah terluas yaitu 14,4% dan Distrik Iwaka sebagai distrik terkecil wilayahnya, yaitu hanya 1,45% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mimika.



Gambar 1.6.

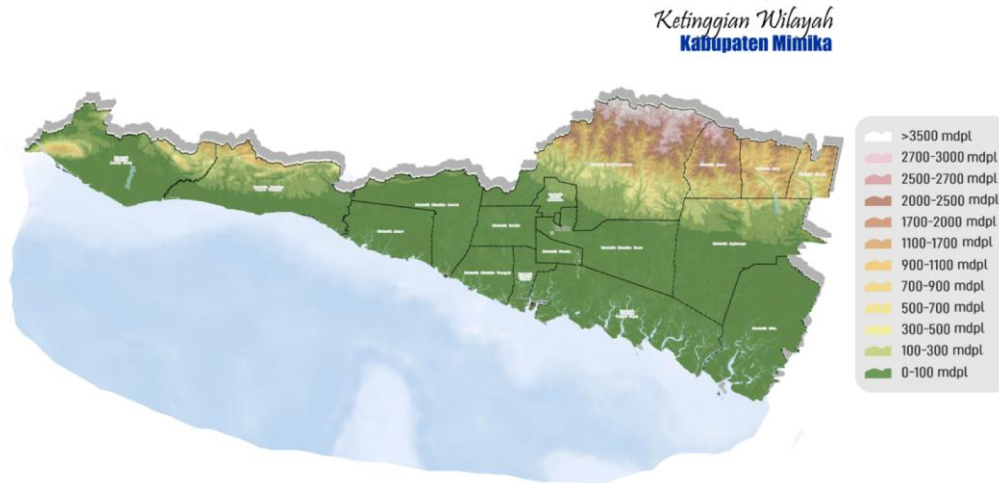
Peta Luas Wilayah Per Distrik Kabupaten Mimika

Sumber: Satu Peta Indonesia 2026, diolah

Geografi Kabupaten Mimika didominasi oleh dataran tinggi dan dataran rendah di pesisir pantai. Kondisi geografis yang beragam ini tentunya memberikan tantangan sekaligus potensi yang unik bagi pengembangan dan pengelolaan wilayah Kabupaten Mimika. Perbedaan luas wilayah antar distrik juga mengindikasikan adanya variasi dalam hal aksesibilitas dan distribusi sumber daya alam di seluruh kabupaten. Variasi topografi yang beragam menyebabkan ketinggian antar wilayah distrik di Kabupaten Mimika juga berbeda-beda. Kabupaten Mimika memiliki beberapa wilayah distrik terendah yang berada di ketinggian 2 mdpl, antara lain Distrik Mimika Barat Jauh dan Mimika Barat Tengah. Sementara



itu, Distrik Alama, Hoya, dan Jila merupakan wilayah tertinggi dengan ketinggian mencapai 2.800 mdpl. Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Agimuga, dan Jita sebagian wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik ini memiliki pantai yang memungkinkan pengelolaan potensi sumber daya bahari.

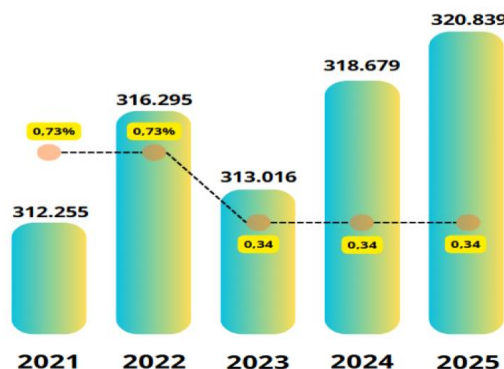


Gambar 1.7

Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Mimika
Sumber: Satu Peta Indonesia 2026, diolah

1.5.2. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan wilayah. Keseimbangan antara kualitas dan kuantitas penduduk menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan. Tingginya pertumbuhan penduduk, jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitasnya, dapat menimbulkan masalah dalam pembangunan daerah. Jumlah penduduk Kabupaten Mimika menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Mimika sebanyak 312.255 Jiwa, meningkat menjadi 316.295 Jiwa pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Jumlah penduduk Kabupaten Mimika menurun menjadi 313.016 jiwa dan meningkat hingga level tertinggi pada tahun 2025, di mana jumlah penduduk Kabupaten Mimika mencapai 320.839 jiwa. Selama periode 2023 hingga 2025, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mimika tercatat sebesar 0,34%.



Gambar 1.8

Laju Pertumbuhan Penduduk dan Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2021-2025
Sumber: BPS Mimika 2026, diolah



Berdasarkan jumlah penduduk per distrik di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Baru merupakan distrik dengan populasi tertinggi sebesar 145.611 jiwa pada tahun 2025. Distrik Wania menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Kabupaten Mimika dengan jumlah penduduk sebesar 64.819 jiwa. Sementara itu, Distrik Agimuga merupakan distrik dengan jumlah penduduk terendah sebesar 1.359 jiwa pada tahun 2023.



Gambar 1.9

Peta Jumlah Penduduk Per Distrik Kabupaten Mimika Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Mimika 2026, diolah

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mimika pada periode tahun 2023–2025 tercatat sebesar 0,34% per tahun. Meskipun secara agregat menunjukkan tren positif, distribusi pertumbuhan antarwilayah memperlihatkan disparitas demografis yang signifikan. Distrik Alama mencatatkan laju pertumbuhan tertinggi mencapai 1,12%, diikuti oleh Distrik Kuala Kencana (0,55%) dan Distrik Wania (0,52%). Pertumbuhan yang melampaui rata-rata kabupaten di wilayah-wilayah tersebut mengindikasikan adanya konsentrasi aktivitas ekonomi dan daya tarik pemukiman yang memicu peningkatan jumlah penduduk secara akseleratif. Sebaliknya, terdapat fenomena penurunan jumlah penduduk yang cukup substansial pada sejumlah wilayah lainnya. Distrik Tembagapura mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar -0,54%, yang kemudian diikuti oleh Distrik Mimika Barat (-0,41%), serta Distrik Hoya dan Mimika Barat Jauh yang masing-masing tercatat sebesar -0,38%. Dinamika pertumbuhan negatif ini merefleksikan adanya kecenderungan migrasi keluar atau perubahan struktur sosial-ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, Distrik Mimika Baru sebagai pusat administrasi menunjukkan stabilitas pertumbuhan pada angka 0,39%. Secara komprehensif, data ini mengonfirmasi bahwa pertumbuhan populasi di Kabupaten Mimika tidak terjadi secara merata, melainkan terpusat pada beberapa distrik strategis.



1.5.3. Pembangunan Sumber Daya Manusia

IPM dihitung berdasarkan tiga komponen utama: Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta Pengeluaran per Kapita. Kabupaten Mimika memiliki IPM tertinggi, yaitu 75,91, dengan UHH 72,83 tahun, HLS 12,96 tahun, dan RLS 10,47 tahun. Pengeluaran per kapita di Kabupaten Mimika juga yang tertinggi di Papua Tengah, mencapai Rp12.076.000. Ini menunjukkan bahwa penduduk di Mimika lebih sehat, lebih berpendidikan, dan memiliki daya beli yang lebih baik dibandingkan kabupaten lain.

Tabel 1.2

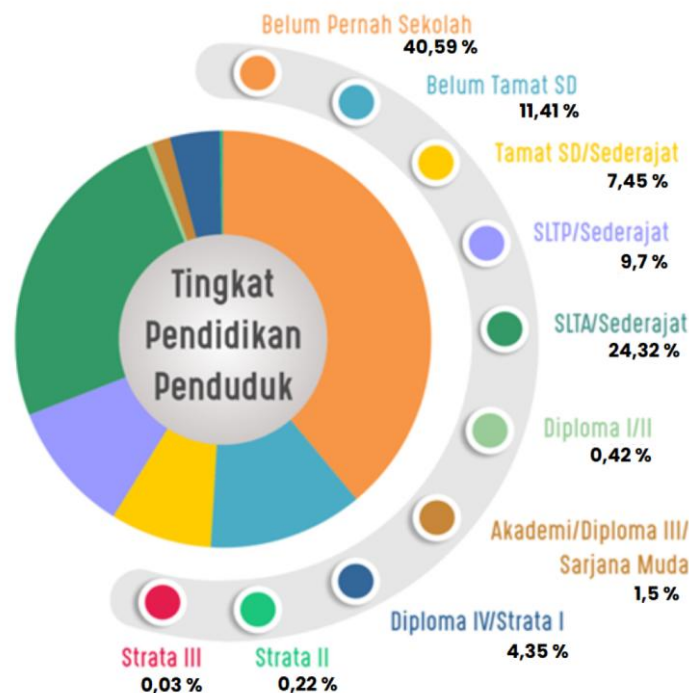
Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten Provinsi Papua Tengah 2025

Kabupaten	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	PPP (Rp'000)	IPM
Mimika	72,83	12,96	10,47	12.076	76,85
Dogiyai	66,49	10,62	4,97	6.182	57,68
Deiyai	66,52	9,85	3,27	5.104	52,07
Nabire	69,82	12,64	10,33	9.381	71,77
Paniai	69,49	10,53	4,79	6.977	58,69
Intan Jaya	66,68	7,69	3,27	6.140	50,71
Puncak	66,77	5,59	2,19	5.975	45,60
Puncak Jaya	67,77	7,51	4,23	5.731	51,78
Papua Tengah	68,04	9,62	6,02	7.347	59,44

Sumber: BPS Provinsi Papua Tengah 2026

1.5.4. Pendidikan

Penduduk Kabupaten Mimika sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SLTA/Sederajat yaitu sebanyak 24,32%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Mimika sudah baik, karena telah mencapai wajib belajar 12 tahun. Tingkat pendidikan terbesar kedua adalah tingkat SMP/ sederajat yaitu sebesar 9,7%. Upaya pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Mimika memiliki tantangan dan kendala yang besar. Tantangan geografis dan aksesibilitas sebagian besar wilayah menjadi kendala utama dalam upaya pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Mimika. Selain itu kendala lain berupa kurangnya tenaga pendidik menjadi hal penting yang perlu diupayakan untuk segera teratasi sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mimika.



Gambar 1.10

Persentase Penduduk Kabupaten Mimika Menurut Jenjang Pendidikan

Sumber: BPS Mimika 2026, diolah

1.5.5. Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang tergolong miskin atau tidak. Seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Mimika selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika pada nilai garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, serta persentasenya. Pada tahun 2021, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp936.862 per kapita per bulan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 30,95 ribu orang atau 14,17 persen dari total penduduk. Pada tahun 2022, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp1.002.327 per kapita per bulan, diikuti kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi 31,58 ribu orang dan persentasenya menjadi 14,28 persen.

Selanjutnya pada tahun 2023, garis kemiskinan kembali meningkat menjadi Rp1.056.252 per kapita per bulan, namun jumlah penduduk miskin justru menurun menjadi 30,31 ribu orang dengan persentase sebesar 13,55 persen. Pada tahun 2024, garis kemiskinan naik menjadi Rp1.099.143 per kapita per bulan dan jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 32,09 ribu orang dengan persentase 14,18 persen. Sementara itu pada tahun 2025, garis kemiskinan kembali meningkat menjadi Rp1.166.466 per kapita per bulan, tetapi jumlah penduduk miskin menurun menjadi 31,31 ribu orang dengan persentase sebesar 13,7 persen. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Mimika mengalami tren peningkatan setiap tahun selama periode 2021–2025. Meskipun demikian, jumlah dan persentase penduduk miskin cenderung berfluktuasi, yang mengindikasikan adanya perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta dinamika daya beli dan kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut.


Tabel 1.3

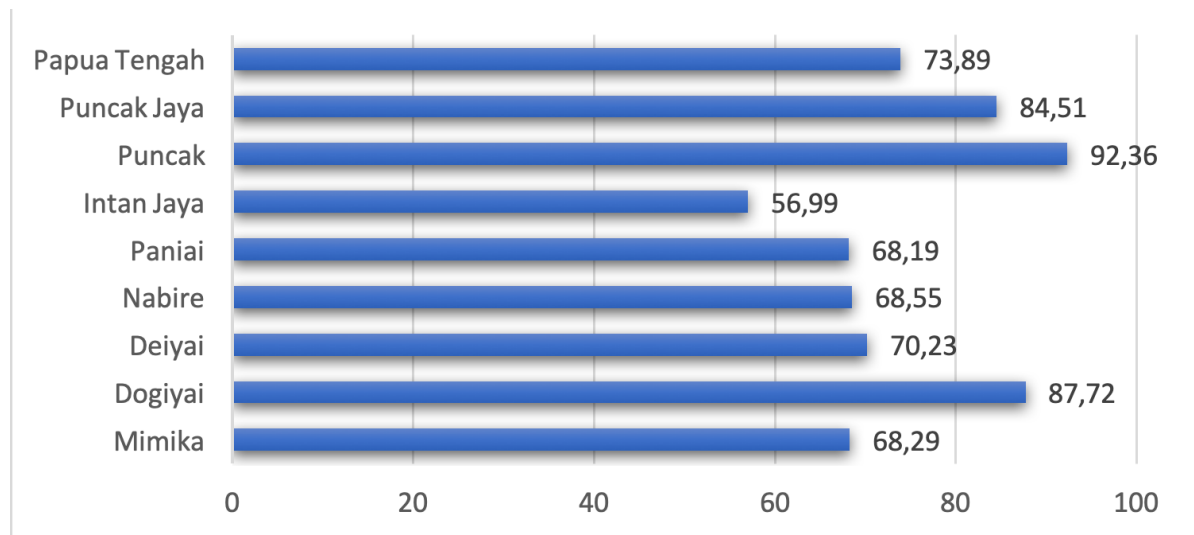
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mimika, 2021–2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2021	936,862	30.95	14.17
2022	1,002,327	31.58	14.28
2023	1,056,252	30.31	13.55
2024	1,099,143	32.09	14.18
2025	1,166,466	31.31	13.7

Sumber: BPS Mimika 2026, diolah

1.5.6. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Mimika pada tahun 2025 tercatat sebagai ketiga terendah, yakni 68,29%, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Kabupaten Mimika tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi formal. Rendahnya TPAK di Kabupaten Mimika mungkin disebabkan oleh tantangan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbedaan ini juga mencerminkan adanya variasi dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi partisipasi dalam angkatan kerja.


Gambar 1.11

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025

Sumber: BPS Provinsi Papua Tengah 2026, diolah

Berdasarkan data penduduk berumur 15 tahun ke atas Kabupaten Mimika mencatatkan jumlah angkatan kerja yakni 155,114 orang, dengan 144,647 di antaranya bekerja, 862 pernah bekerja namun tidak sedang bekerja, dan 9,605 lainnya tidak pernah bekerja.


Tabel 1.4

Jumlah Angkatan Kerja Per Kabupaten di Papua Tengah Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Bekerja	Pengangguran			Total Angkatan Kerja
		Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah Pengangguran	
Mimika	144,647	862	9,605	10,467	155,114
Dogiyai	78,662	309	1,561	1,870	80,532
Deiyai	52,490	NA	1,603	1,954	54,444
Nabire	78,314	1,028	1,524	2,552	80,866
Paniai	120,287	NA	4,627	5,184	125,471
Intan Jaya	60,404	NA	5,064	5,287	65,691
Puncak	90,258	NA	NA	NA	90,384
Puncak Jaya	165,177	NA	1,665	2,281	167,458
Papua Tengah	790,239	3,946	25,775	29,721	819,960

Sumber: BPS Provinsi Papua Tengah 2026, diolah

1.5.7. Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam membentuk total perekonomian daerah. Data ini penting untuk melihat struktur dan perkembangan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu. Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, total PDRB Kabupaten Mimika tercatat sebesar 50.871.587,70 miliar rupiah. Nilai tersebut kemudian meningkat menjadi 69.619.712,80 miliar rupiah pada tahun 2021, dan kembali naik menjadi 80.289.153,60 miliar rupiah pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 nilai PDRB mencapai 86.630.394,90 miliar rupiah, dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 90.791.544,80 miliar rupiah. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha di Kabupaten Mimika selama lima tahun terakhir.

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Mimika. Nilai sektor ini meningkat dari 51.027.626,40 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 130.210.492,00 miliar rupiah pada tahun 2024, sehingga menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Selain itu, beberapa sektor lain juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, seperti konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi yang secara konsisten mengalami peningkatan nilai tambah selama periode tersebut. Di sisi lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap berperan sebagai salah satu sektor penting dalam perekonomian daerah meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan sektor pertambangan. Sektor jasa seperti jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga menunjukkan tren peningkatan secara bertahap, yang mencerminkan berkembangnya



aktivitas jasa dan pelayanan di Kabupaten Mimika. Secara keseluruhan, struktur PDRB Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, namun sektor perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa turut memperkuat dinamika pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1.5

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika (miliar rupiah) 2020–2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,482,986.90	1,527,895.90	1,569,980.90	1,659,342.90	1,654,168.80
B	Pertambangan dan Penggalian	51,027,626.40	81,896,726.70	96,190,021.50	111,810,973.50	130,210,492.00
C	Industri Pengolahan	134,047.40	136,663.90	138,197.10	142,268.80	147,235.40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,100.90	14,128.50	15,898.20	17,108.40	18,323.20
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, dll.	7,115.90	7,362.00	7,568.50	7,601.40	7,330.00
F	Konstruksi	2,686,446.70	2,803,205.50	3,056,806.20	3,152,874.60	3,266,726.20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	2,268,224.70	2,405,650.40	2,544,023.30	2,857,526.80	3,106,553.00
H	Transportasi dan Pergudangan	792,451.90	963,760.00	1,219,640.00	1,413,127.00	1,703,275.10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	232,258.40	237,309.00	248,491.30	261,622.40	276,967.90
J	Informasi dan Komunikasi	1,649,482.30	1,764,333.60	1,841,706.10	1,861,460.50	1,914,510.50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	367,455.10	380,794.10	433,625.20	513,135.00	569,343.10
L	Real Estat	664,079.40	677,653.20	727,110.10	742,440.40	819,885.60
M,N	Jasa Perusahaan	387,632.80	396,123.70	407,556.60	425,855.40	451,304.70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dll.	1,409,900.60	1,410,864.30	1,408,219.40	1,345,294.60	1,459,720.30
P	Jasa Pendidikan	162,015.80	162,375.40	167,409.00	169,147.40	176,834.50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195,969.20	198,501.20	199,324.30	199,291.20	218,437.60
R,S,T,U	Jasa Lainnya	235,540.70	237,708.10	248,536.00	279,724.30	296,477.90
TOTAL	Produk Domestik Regional Bruto	50,871,587.70	69,619,712.80	80,289,153.60	86,630,394.90	90,791,544.80

Sumber: BPS Mimika 2026, diolah

Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 menunjukkan struktur perekonomian daerah yang sangat didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2020, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 80,09 persen



terhadap total PDRB dan terus meningkat menjadi 86,01 persen pada tahun 2021, 87,11 persen pada tahun 2022, 88,14 persen pada tahun 2023, hingga mencapai 89 persen pada tahun 2024. Besarnya kontribusi sektor ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan menjadi penggerak utama perekonomian Kabupaten Mimika. Di luar sektor pertambangan, kontribusi beberapa lapangan usaha lainnya relatif lebih kecil. Sektor konstruksi menjadi salah satu penyumbang terbesar setelah pertambangan dengan kontribusi 4,22 persen pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 2,94 persen pada tahun 2021, 2,30 persen pada tahun 2022, 2,49 persen pada tahun 2023, dan 2,23 persen pada tahun 2024. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga memberikan kontribusi cukup penting dengan persentase 3,56 persen pada tahun 2020, menurun menjadi 2,53 persen pada tahun 2021, 1,10 persen pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 2,25 persen pada tahun 2023, dan 2,12 persen pada tahun 2024.

Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan kontribusi yang relatif kecil dan cenderung menurun dari 2,33 persen pada tahun 2020 menjadi 1,60 persen pada tahun 2021, 1,42 persen pada tahun 2022, 1,31 persen pada tahun 2023, dan 1,13 persen pada tahun 2024. Sektor informasi dan komunikasi juga memberikan kontribusi yang cukup stabil meskipun berfluktuasi, yaitu 2,59 persen pada tahun 2020, 1,85 persen pada tahun 2021, 0,39 persen pada tahun 2022, 1,47 persen pada tahun 2023, dan 1,31 persen pada tahun 2024. Selain itu, beberapa sektor jasa seperti transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial memberikan kontribusi yang relatif kecil, umumnya di bawah dua persen setiap tahunnya. Secara keseluruhan, distribusi PDRB Kabupaten Mimika pada periode 2020–2024 menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah sangat terkonsentrasi pada sektor pertambangan dan penggalian, sementara sektor-sektor lainnya berperan sebagai sektor pendukung dalam pembentukan aktivitas ekonomi daerah.

Tabel 1.6

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika (persen) 2020–2024

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.33	1.6	1.42	1.31	1.13
B	Pertambangan dan Penggalian	80.09	86.01	87.11	88.14	89
C	Industri Pengolahan	0.21	0.14	0.13	0.11	0.1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, dll.	0.01	0.01	2.77	0.01	0.01
F	Konstruksi	4.22	2.94	2.3	2.49	2.23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	3.56	2.53	1.1	2.25	2.12
H	Transportasi dan Pergudangan	1.24	1.01	0.23	1.11	1.16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.36	0.25	1.67	0.21	0.19
J	Informasi dan Komunikasi	2.59	1.85	0.39	1.47	1.31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.58	0.4	0.66	0.4	0.39



Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
L	Real Estat	1.04	0.71	0.66	0.59	0.56
M,N	Jasa Perusahaan	0.61	0.42	0.37	0.34	0.31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dll.	2.21	1.48	1.28	1.06	1
P	Jasa Pendidikan	0.25	0.17	0.15	0.13	0.12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.31	0.21	0.18	0.16	0.15
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.37	0.25	0.23	0.22	0.2
TOTAL	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika dalam penyusunan LKIP Kabupaten Mimika tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut adalah sistematika penulisan laporan ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyampaikan penjelasan umum tentang Pemerintah Kabupaten Mimika, dengan penekanan pada aspek-aspek strategis dan masalah utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mimika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menyajikan ringkasan/ikhtisar mengenai perjanjian kinerja tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika

Pada bab ini memaparkan capaian kinerja untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Analisis capaian kinerja untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025;
- Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024;
- Membandingkan realisasi kinerja hingga tahun 2025 dengan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2025;
- Menganalisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pencapaian perjanjian kinerja;
- Menganalisis penyebab keberhasilan, kegagalan, peningkatan, atau penurunan kinerja serta rencana tindak lanjut.

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini menjelaskan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menyajikan tentang kesimpulan umum mengenai capaian kinerja dan langkah-langkah yang akan diambil di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Lampiran dalam laporan ini memuat keterangan tambahan yang relevan dan berkaitan dengan akuntabilitas serta kinerja yang telah dicapai sepanjang tahun 2025.

BAB 2

Perencanaan Strategis





2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah. Visi Pemerintah Kabupaten Mimika yang tertuang dalam RPJMD tahun 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Mimika cerdas, aman, damai, dan sejahtera". Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka diturunkan dalam lima misi daerah yaitu: (1) Membangun sumber daya manusia yang cerdas dan memahami teknologi informasi; (2) Menciptakan Mimika yang aman, tertib dan damai; (3) Mewujudkan pemerataan pembangunan pelayanan dasar dan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir; (4) Mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, akuntabel, profesional dan inovatif; (5) Membangun sentra-sentra ekonomi baru di wilayah Mimika. Berdasarkan rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kaimana Tahun 2020-2024, tujuan pembangunan Kabupaten Mimika sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Tujuan Pembangunan

Misi	Misi Pembangunan	Tujuan Pembangunan
I	Membangun sumber daya manusia yang cerdas dan memahami teknologi informasi	Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
II	Menciptakan Mimika yang aman, tertib dan damai	a. Meningkatkan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib b. Mewujudkan masyarakat yang damai
III	Mewujudkan pemerataan pembangunan pelayanan dasar dan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir	Meningkatkan pemerataan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan
IV	Mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, akuntabel, profesional dan inovatif	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel dan inovatif
V	Membangun sentra-sentra ekonomi baru di wilayah Mimika	Mendorong pertumbuhan ekonomi di Mimika

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang telah dirumuskan, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2.
Sasaran Pembangunan

No	Sasaran
1	Meningkatnya pemerataan kualitas kesehatan
2	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan masyarakat



No	Sasaran
3	Meningkatnya daya beli masyarakat
4	Meningkatnya pengetahuan TIK masyarakat
5	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
6	Menurunnya tingkat kemiskinan
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat
8	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat
9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan, permukiman, dan perekonomian
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
11	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi
12	Meningkatnya profesionalitas pegawai
13	Meningkatnya kepuasan masyarakat
14	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
15	Meningkatnya kesempatan kerja
16	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN
17	Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan
18	Meningkatkan akselerasi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di pedalaman dan pesisir

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

2.1.2. RKPD Kabupaten Mimika tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyusun RKPD tahun 2025. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mimika berfokus pada "Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Penguatan Daya Saing Menuju Mimika Unggul." Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mimika Tahun 2025 sejalan dengan Tema RKP Tahun 2025 yaitu "Pembangunan Infrastruktur Untuk Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Dan Penguatan Daya Saing Menuju Mimika Unggul", dan Tema RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 yaitu "Papua Tengah Sehat, Cerdas dan Produktif". Pada tahun 2025, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Mimika mengacu pada visi dan misi kepala daerah, yaitu "Terwujudnya Mimika cerdas, aman, damai, dan sejahtera". Pemerintah Kabupaten Mimika telah menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 dalam dokumen RKPD sebagai berikut.


Tabel 2.3.

Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025

Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan masyarakat
		Meningkatnya Pemerataan kualitas kesehatan
		Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat
2	Meningkatkan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat
	Mewujudkan masyarakat yang damai	Meningkatnya Kerukunan hidup bermasyarakat
3	Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman, perhubungan dan perekonomian
4	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi
		Meningkatnya profesionalitas pegawai
		Meningkatnya kepuasan masyarakat
5	Mendorong pertumbuhan ekonomi di Mimika	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya nilai Investasi PMA dan PMDN
		Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan

2.2. Perjanjian Kinerja Kabupaten Mimika tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen komitmen antara pimpinan instansi dengan pejabat atau unit kerja untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target capaian yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pelaksanaan kinerja. Selain itu, dokumen ini juga menjadi dasar dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja guna memastikan bahwa program dan kegiatan dilaksanakan secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikut Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2025.



Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Kabupaten Mimika Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya pemerataan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Indeks	83,0
2	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	Indeks	21,16
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks pengeluaran	Indeks	24,4
4	Meningkatnya pengetahuan TIK masyarakat	IP TIK	Jumlah	24,785
5	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	IPG	Indeks	13,4
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	Persen	23,3
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	Angka kriminalitas	Kasus	440
8	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Indeks gotong royong	Indeks	0,58
		Indeks rasa aman	Indeks	0,69
		Indeks toleransi	Indeks	0,58
9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman, perhubungan, dan perekonomian	Rasio infrastruktur berfungsi baik	Persen	51
		Rasio ketersediaan infrastruktur	Persen	70
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	Persen	85
11	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi	Nilai SAKIP	Predikat	B
		Indeks reformasi birokrasi	Indeks	78
12	Meningkatnya profesionalitas pegawai	Indeks profesionalitas aparatur	Indeks	95
13	Meningkatnya kepuasan masyarakat	IKM	Predikat	A
14	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	Tingkat pendapatan masyarakat per kapita	Rp juta/kapita	30.400.000
15	Meningkatnya kepuasan kerja	Tingkat pengangguran kerja	Persen	75
16	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PPMDN	Nilai investasi (PMDN/PMA)	Rp Triliun	70
17	Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian & perdagangan	Persen	Pertanian 0,50
				Perdagangan 4



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025
18	Meningkatnya akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi pedalaman dan pesisir	Pertumbuhan sentra ekonomi pedalaman dan pesisir	Persen	1

2.3. Metode Perhitungan Capaian Nilai Kinerja dan Nilai Kinerja Organisasi

Sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja, dilakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup pengukuran ketercapaian indikator kinerja, analisis kesesuaian antara target dan realisasi, serta penilaian kualitas tata kelola kinerja. Salah satu output utama dari proses evaluasi tersebut adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO), yang mencerminkan tingkat pencapaian kinerja terhadap target indikator kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja.

Perhitungan NKO berpedoman pada PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Berdasarkan peraturan terbut, pengukuran kinerja organisasi tidak hanya mempertimbangkan capaian kuantitatif indikator, tetapi juga memperhitungkan kualitas akuntabilitas kinerja yang tercermin dari predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dengan demikian, NKO berfungsi sebagai ukuran agregat yang mengintegrasikan capaian kinerja substantif dan kualitas tata kelola kinerja. Secara matematis, penghitungan NKO dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Untuk setiap indikator kinerja ke- i , capaian kinerja dihitung sebagai rasio antara realisasi dan target:

$$A_i = \frac{R_i}{T_i} \times 100\%$$

Nilai capaian tersebut kemudian dinormalisasi dengan batas maksimum 110 persen, sesuai ketentuan PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024:

$$N_i = \min (A_i, 110\%)$$

Selanjutnya, capaian kinerja yang telah dinormalisasi dikoreksi berdasarkan predikat AKIP organisasi melalui faktor koreksi, dengan besaran koreksi ditetapkan sebagai berikut.


Tabel 2.5.

Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Nilai akhir capaian kinerja per indikator dihitung dengan rumus:

$$F_i = N_i \times (1 - k)$$

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) kemudian diperoleh sebagai rata-rata dari seluruh nilai akhir capaian indikator kinerja:

$$NKO = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [\min(\frac{R_i}{T_i} \times 100\%, 110\%) \times (1 - k)]$$

dengan:

- R_i : realisasi indikator kinerja ke- i
 T_i : target indikator kinerja ke- i
 k : faktor koreksi berdasarkan predikat AKIP
 n : jumlah indikator kinerja

Adapun matriks perhitungan nilai kinerja organisasi menggunakan format berikut.

Tabel 2.6.

Matriks Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) × (100% - (2))
1								
2								
3								
4								
Total Capaian PK (4)								
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)								
Predikat PKO (6)								

Hasil NKO dikelompokkan menjadi lima predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa sebagai berikut.



Tabel 2.7.
Predikat PKO

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Melalui penerapan pengukuran NKO yang terstandardisasi, transparan, dan berbasis hasil sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Mimika berupaya menumbuhkan budaya kerja yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pencapaian *outcome*, sejalan dengan arah reformasi birokrasi dan komitmen membangun organisasi pemerintahan yang modern dan terpercaya.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja





3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki sasaran strategis sebanyak 18 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 22 indikator. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025, terdapat sebaran dan variasi nilai dan predikat kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika. Indikator dengan capaian istimewa meliputi tiga indikator yaitu penurunan angka kemiskinan sebesar 170,07%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 110,37%, peningkatan kualitas lingkungan hidup/IKLH sebesar 103,49%, dan peningkatan pendapatan masyarakat per kapita sebesar 102,80%. Indikator dengan predikat baik mencakup sembilan indikator yaitu indeks kesehatan, angka kriminalitas, indeks kerukunan (gotong royong, rasa aman, toleransi), rasio infrastruktur, nilai SAKIP, indeks kepuasan masyarakat (IKM). Indikator butuh perbaikan terlihat pada indeks pengeluaran, IP TIK, Indeks Pembangunan Gender (IPG), indeks profesionalitas aparatur, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedalaman/pesisir. Indikator dengan predikat kurang tercatat pada indeks pendidikan, indeks reformasi birokrasi, nilai investasi (PMA/PMDN), serta pertumbuhan sektor perdagangan. Adapun indikator dengan predikat sangat kurang atau kritis adalah sektor pertanian yang mengalami kontraksi tajam dengan capaian pertumbuhan yang negatif 708% dari target. Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki kemampuan menjaga stabilitas sosial dan menurunkan angka kemiskinan makro. Namun, menghadapi ancaman serius pada ketahanan pangan yaitu sektor pertanian dan kemandirian ekonomi yaitu nilai investasi rendah. Berikut ini merupakan nilai capaian kinerja dan predikat per masing-masing indikator kinerja utama tahun 2025

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Predikat
1	Meningkatnya pemerataan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	83,0	74,12	89,30	BAIK
2	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	21,16	11,18	52,84	KURANG
3	Meningkatkan daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	24,4	17,35	71,11	BUTUH PERBAIKAN
4	Meningkatnya pengetahuan TIK masyarakat	IP TIK	Jumlah	24,785	15,785	63,69	BUTUH PERBAIKAN
5	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	IPG	Indeks	13,4	9,7	72,39	BUTUH PERBAIKAN
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	23,3	13,70	170,07	ISTIMEWA
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	Angka Kriminalitas	Kasus	440	460	95,65	BAIK
8	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Indeks Gotong Royong	Indeks	0,58	0,51	87,93	BAIK
		Indeks Rasa Aman	Indeks	0,69	0,57	82,61	BAIK
		Indeks Toleransi	Indeks	0,58	0,55	94,83	BAIK



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Predikat
9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman, perhubungan dan perekonomian	Rasio Infrastruktur berfungsi baik	Persen	51	43,15	84,61	BAIK
		Rasio ketersediaan Infrastruktur	Persen	70	61,2	87,43	BAIK
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	Persen	85	87,97	103,49	ISTIMEWA
11	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	Predikat	B	CC (57,11)	95,18	BAIK
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78	44,44	56,97	KURANG
12	Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks	95	72,25	76,05	BUTUH PERBAIKAN
13	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM	Predikat	A	B (81,76)	85,00	BAIK
14	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	Tingkat pendapatan masyarakat per kapita	Rp juta/kapita	30.400.000	31.250.000	102,80	ISTIMEWA
15	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran kerja	Persen	7,45	6,75	110,37	ISTIMEWA
16	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Rp Triliun	70	28,5	40,71	KURANG
17	Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian & perdagangan	Persen	Pertanian:	Pertanian:	Pertanian:	
				0,5	-3,54	-708	SANGAT KURANG
				Perdagangan:	Perdagangan:	Perdagangan:	
				4	1,79	44,75	KURANG
18	Meningkatnya akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir	Pertumbuhan sentra ekonomi pedalaman dan pesisir	Persen	1	0,65	65,00	BUTUH PERBAIKAN

3.2. Nilai Kinerja Organisasi Kabupaten Mimika tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki **capaian nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 34,82 atau berpredikat kurang**. Artinya, tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika masih memerlukan perbaikan secara menyeluruh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja organisasi belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam perumusan indikator kinerja yang terukur, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.



Tabel 3.2.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
1	Meningkatnya pemerataan kualitas kesehatan masyarakat	1 Indeks Kesehatan	Indeks	83,0	74,12	89,30	89,30	20%	71,44
2	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan masyarakat	2 Indeks Pendidikan	Indeks	21,16	11,18	52,84	52,84	20%	42,27
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	3 Indeks Pengeluaran	Indeks	24,16	17,35	71,81	71,81	20%	57,45
4	Meningkatnya pengetahuan TIK masyarakat	4 IP TIK	Jumlah	24,785	15,785	63,69	63,69	20%	50,95
5	Meningkatnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	5 IPG	Indeks	13,4	9,7	72,39	72,39	20%	57,91
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	6 Angka Kemiskinan	%	23,3	13,70	170,07	110,00	20%	88,00
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	7 Angka Kriminalitas	Kasus	440	460	95,65	95,65	20%	76,52
8	Meningkatnya kerukunan masyarakat	8 Indeks Gotong Royong	Indeks	0,58	0,51	87,93	87,93	20%	70,34
		9 Indeks Rasa Aman	Indeks	0,69	0,57	82,61	82,61	20%	66,09
		10 Indeks Toleransi	Indeks	0,58	0,55	94,83	94,83	20%	75,86
9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman, perhubungan dan perekonomian	11 Rasio Infrastruktur berfungsi baik	%	51	43,15	84,61	84,61	20%	67,69
		12 Rasio ketersediaan Infrastruktur	%	70	61,2	87,43	87,43	20%	69,94
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13 IKLH	%	85	87,97	103,49	103,49	20%	82,80
11	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi	14 Nilai SAKIP	Predikat	B	57,11	95,18	95,18	20%	76,15
		15 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78	44,44	56,97	56,97	20%	45,58

LAPORAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Mimika
Tahun 2025



N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisa si	Capai an (%)	Normalis asi Capaian PK (1)	Koreksi Normalis asi Capaian Berdasar kan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
1 2	Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	1 6	Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks	95	72,25	76,05	20%	60,84
1 3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	1 7	IKM	Predikat	A	B (81,76)	85,00	20%	68,00
1 4	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	1 8	Tingkat Pendapatan Masyarakat Per Kapita	Rp Juta/ka pita	30.400.000	31.250.000	102,80	20%	82,24
1 5	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1 9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,45	6,75	110,37	20%	88,00
1 6	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	2 0	Nilai Investasi (PMDN/PM A)	Rp Triliun	70	28,5	40,71	20%	32,57
1 7	Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan	2 1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perdagangan	%	Pertanian: 0,50	-3,54	-708,00	20%	-566,40
					Perdagangan: 4	1,79	44,75	20%	35,80
1 8	Meningkatnya akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir	2 2	Pertumbuhan sentra ekonomi pedalaman dan pesisir	%	1	0,65	1,08	20%	0,87
Total Capaian PK (4)									800,91
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)									34,82
Predikat (6)									KURANG

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2025

3.3.1. Sasaran 1 "Meningkatnya Pemerataan Kualitas Kesehatan Masyarakat"

3.3.1.1. IKU 1: Indeks Kesehatan

Pada Sasaran 1: Meningkatkan Pemerataan Kualitas Kesehatan Masyarakat, kinerja diukur melalui indikator Indeks Kesehatan. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 83,0, dengan realisasi mencapai 74,12 sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 89,30 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 72,55, capaian tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan tingkat capaian 102,16 persen terhadap realisasi tahun sebelumnya. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2025 yang juga sebesar 83,0, maka realisasi tahun 2025 telah mencapai 89,30 persen dari target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, masih diperlukan upaya yang lebih



optimal untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Kualitas Kesehatan Masyarakat								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indeks Kesehatan	Indeks	83,0	74,12	89,30	72,55	102,16	83,0	89,30

Pemerintah Kabupaten Mimika telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan sektor kesehatan guna meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pedalaman dan wilayah terpencil, dapat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Salah satu fokus utama pembangunan kesehatan di Kabupaten Mimika adalah peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke wilayah pedalaman. Pemerintah daerah terus berupaya memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan meningkatkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, serta pos pelayanan kesehatan yang tersebar di berbagai distrik. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan akses pelayanan kesehatan yang masih terjadi akibat kondisi geografis wilayah Kabupaten Mimika yang luas dan memiliki tantangan aksesibilitas yang cukup tinggi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mimika juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan masalah stunting sebagai salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dalam rangka mempercepat penurunan prevalensi stunting, pemerintah daerah melaksanakan berbagai kegiatan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang melibatkan berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan berbagai program intervensi gizi yang dilakukan oleh sektor kesehatan maupun sektor non-kesehatan. Pendekatan konvergensi ini dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, dimana berbagai program yang berkaitan dengan kesehatan, gizi, sanitasi, pendidikan, serta perlindungan sosial diarahkan untuk mendukung perbaikan status gizi masyarakat, khususnya pada kelompok sasaran prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta anak pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Upaya ini juga melibatkan dukungan dari berbagai mitra pembangunan, termasuk lembaga non-pemerintah yang berkontribusi dalam penguatan program penurunan stunting di Kabupaten Mimika.

Selain pelaksanaan aksi konvergensi stunting, Pemerintah Kabupaten Mimika juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting guna memastikan bahwa intervensi yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas intervensi yang dilakukan. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting juga dilakukan melalui pembentukan dan penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang melibatkan berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Tim ini memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan program penurunan stunting, meningkatkan sinergi antar sektor pembangunan, serta



memastikan bahwa seluruh intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan status gizi masyarakat.



Gambar 3.1.

Workshop Pencegahan Stunting di Kabupaten Mimika

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara bertahap serta memperbaiki pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kabupaten. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai Indeks Kesehatan pada tahun-tahun mendatang serta mendukung tercapainya target pembangunan kesehatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemerataan kualitas kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar, peningkatan akses pelayanan kesehatan hingga wilayah pedalaman dan terpencil, serta pelaksanaan berbagai program kesehatan masyarakat yang berfokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting melalui koordinasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas intervensi yang dilakukan dalam penanganan masalah gizi masyarakat.

Faktor Pendorong

1. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat



2. Dukungan kebijakan daerah dalam percepatan penurunan stunting melalui pendekatan konvergensi lintas sektor
3. Pelaksanaan program kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif
4. Dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah dan mitra pembangunan
5. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat

Faktor Penghambat

1. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Mimika yang luas serta memiliki banyak wilayah dengan akses transportasi yang terbatas
2. Keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan pada beberapa wilayah distrik
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di wilayah terpencil
4. Tantangan dalam perubahan perilaku masyarakat terkait pola hidup sehat dan pemenuhan gizi keluarga
5. Keterbatasan ketersediaan data indikator kesehatan yang terintegrasi secara tepat waktu

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatan pada seluruh wilayah distrik
2. Memperkuat pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman dan pesisir
3. Mengoptimalkan pelaksanaan program promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan masyarakat
4. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting
5. Meningkatkan sistem pengelolaan dan integrasi data kesehatan guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data

3.3.2. Sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Pemerataan Pendidikan Masyarakat”**3.3.2.1. IKU 2: Indeks Pendidikan**

Pada Sasaran 2: Meningkatkan Pemerataan Kualitas Pendidikan Masyarakat, kinerja diukur melalui indikator Indeks Pendidikan. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 21,16, dengan realisasi yang dicapai sebesar 11,18 sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 52,84 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 10,50, capaian pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan tingkat capaian 106,48 persen terhadap realisasi tahun sebelumnya. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2025 sebesar 21,16, maka realisasi tahun 2025 telah mencapai 52,84 persen dari target tersebut. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, upaya peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan masih perlu terus diperkuat agar target pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.



Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Kualitas Pendidikan Masyarakat								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indeks Pendidikan	Indeks	21,16	11,18	52,84	10,50	106,48	21,16	52,84

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya strategis melalui penyusunan kebijakan pembangunan pendidikan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan meluncurkan Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika Tahun 2025–2045 sebagai dokumen perencanaan pembangunan pendidikan jangka panjang di daerah. Peluncuran GDPP tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat arah pembangunan pendidikan daerah secara sistematis dan berkelanjutan. Dokumen ini dirancang sebagai pedoman strategis yang memuat visi, arah kebijakan, strategi, serta tahapan pembangunan pendidikan di Kabupaten Mimika dalam jangka panjang. Dengan adanya dokumen tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan pembangunan pendidikan yang lebih terintegrasi, terarah, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sumber daya manusia di masa depan.

Penyusunan Grand Design Pembangunan Pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang mempengaruhi pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Mimika. Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen tersebut antara lain kondisi geografis wilayah, tingkat aksesibilitas pendidikan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Kabupaten Mimika memiliki karakteristik wilayah yang cukup kompleks, dimana terdapat perbedaan kondisi akses pendidikan antara wilayah perkotaan, wilayah pesisir, serta wilayah pedalaman dan pegunungan. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat kesenjangan akses pendidikan pada beberapa wilayah, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur transportasi dan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pendidikan daerah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antarwilayah, sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas.

Selain memperkuat arah kebijakan pembangunan pendidikan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Mimika juga terus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui berbagai program pembangunan pendidikan, seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penguatan sistem tata kelola pendidikan daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dalam konteks pembangunan daerah, sektor pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan daya saing tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Mimika.



Gambar 3.2.

Tingkatkan Pendidikan Berkualitas, Bupati Mimika Launching GDPP 2025–2045

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat secara bertahap serta mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Implementasi kebijakan pembangunan pendidikan yang terarah melalui *Grand Design* Pembangunan Pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan nilai Indeks Pendidikan pada tahun-tahun mendatang serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mimika.

Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan masyarakat melalui penguatan kebijakan pembangunan pendidikan yang terarah dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penyusunan dan peluncuran *Grand Design* Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika Tahun 2025–2045 sebagai pedoman pembangunan pendidikan jangka panjang di daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, memperluas akses pendidikan di seluruh wilayah, serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik guna mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Faktor Pendorong

1. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan
2. Peluncuran *Grand Design* Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika Tahun 2025–2045 sebagai arah kebijakan pembangunan pendidikan jangka panjang
3. Dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan sektor pendidikan



4. Peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah
5. Integrasi kebijakan pembangunan pendidikan dengan program pembangunan daerah lainnya

Faktor Penghambat

1. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Mimika yang luas dan memiliki wilayah pedalaman serta pesisir dengan akses transportasi yang terbatas
2. Masih adanya kesenjangan akses pendidikan antarwilayah
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di beberapa wilayah terpencil
4. Keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga pendidik pada beberapa distrik
5. Belum optimalnya integrasi data pendidikan untuk mendukung perencanaan pembangunan pendidikan berbasis data

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan di seluruh wilayah
2. Mengoptimalkan implementasi *Grand Design* Pembangunan Pendidikan sebagai pedoman pembangunan pendidikan jangka panjang
3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui program peningkatan kompetensi serta distribusi guru yang lebih merata
4. Memperkuat sistem pengelolaan dan integrasi data pendidikan guna mendukung perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih efektif
5. Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan sumber daya manusia

3.3.3. Sasaran 3 “Meningkatnya Daya Beli Masyarakat”**3.3.3.1. IKU 3: Indeks Pengeluaran**

Pada Sasaran 3: Meningkatkan Daya Beli Masyarakat, kinerja diukur melalui indikator Indeks Pengeluaran. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 24,4, dengan realisasi yang dicapai sebesar 17,35 sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 71,11 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 13,12, capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan tingkat capaian 132,24 persen terhadap realisasi tahun sebelumnya. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 24,4, maka realisasi tahun 2025 telah mencapai 71,11 persen dari target tersebut. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tingkat daya beli masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih diperlukan upaya yang lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perluasan kesempatan kerja guna mencapai target yang telah ditetapkan.



Sasaran 3: Meningkatkan Daya Beli Masyarakat								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indeks Pengeluaran	Indeks	24,4	17,35	71,11	13,12	132,24	24,4	71,11

Daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Peningkatan daya beli tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh stabilitas harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi daerah, serta ketersediaan bahan pangan di pasar. Oleh karena itu, upaya peningkatan daya beli masyarakat tidak hanya dilakukan melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui berbagai kebijakan stabilisasi harga dan pengendalian inflasi daerah. Dalam rangka menjaga stabilitas harga serta meningkatkan daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mimika telah melaksanakan berbagai program intervensi ekonomi masyarakat, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pangan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan perangkat daerah terkait. Program ini bertujuan untuk menyediakan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya pada periode-periode tertentu dimana terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan.

Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan operasi pasar murah yang menasar masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di wilayah kampung dan daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap bahan pangan. Dalam pelaksanaan operasi pasar murah tersebut, pemerintah daerah memberikan subsidi harga bahan pangan hingga mencapai 90 persen, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Program ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam membantu masyarakat menghadapi tekanan kenaikan harga bahan pokok. Upaya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya beli masyarakat juga dilakukan melalui kegiatan gerakan pangan murah dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia serta berbagai kegiatan stabilisasi pasokan pangan yang dilakukan secara berkala. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.

**Gambar 3.3.**

Peringati Hari Pangan Sedunia, Dinas Ketahanan Pangan Mimika Gelar Gerakan Pangan Murah

Selain program stabilisasi harga pangan, pemerintah daerah juga melakukan berbagai upaya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi pangan lokal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kegiatan penanaman jagung secara massal yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan berbagai pemangku kepentingan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Penguatan sektor pangan lokal menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka panjang. Dengan meningkatnya produksi pangan lokal, diharapkan harga bahan pangan dapat lebih stabil serta masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan pangan. Selain itu, pengembangan sektor pertanian dan pangan juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian dan usaha pangan.

Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta meningkatkan daya beli masyarakat secara bertahap. Intervensi kebijakan yang dilakukan melalui stabilisasi harga pangan, penguatan ketahanan pangan daerah, serta peningkatan produksi pangan lokal diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan nilai Indeks Pengeluaran pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan stabilisasi harga bahan pangan, peningkatan ketersediaan pasokan pangan, serta penguatan ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah, operasi pasar murah dengan pemberian subsidi harga bahan pokok, serta pengembangan produksi pangan lokal melalui kegiatan penanaman komoditas pangan strategis seperti jagung. Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong koordinasi lintas



sektor dalam pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

Faktor Pendorong

1. Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat
2. Pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah untuk meningkatkan keterjangkauan bahan pangan
3. Pelaksanaan operasi pasar murah dengan subsidi harga bahan pokok bagi masyarakat
4. Dukungan berbagai perangkat daerah dalam penguatan ketahanan pangan daerah
5. Pengembangan produksi pangan lokal melalui kegiatan pertanian dan ketahanan pangan

Faktor Penghambat

1. Fluktuasi harga bahan pangan yang dipengaruhi oleh kondisi pasar nasional dan regional
2. Ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah
3. Keterbatasan infrastruktur distribusi pangan di beberapa wilayah
4. Kondisi geografis wilayah yang mempengaruhi distribusi bahan pangan ke wilayah pedalaman
5. Keterbatasan kapasitas produksi pangan lokal pada beberapa komoditas strategis

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan intensitas pelaksanaan program stabilisasi harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah
2. Memperluas jangkauan pelaksanaan operasi pasar murah hingga ke wilayah pedalaman
3. Mengembangkan program peningkatan produksi pangan lokal untuk memperkuat ketahanan pangan daerah
4. Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengendalian inflasi daerah
5. Mendorong pengembangan sektor pertanian dan usaha pangan masyarakat sebagai sumber peningkatan pendapatan masyarakat

3.3.4. Sasaran 4 "Meningkatnya Pengetahuan TIK Masyarakat"**3.3.4.1. IKU 4 : IP TIK**

Sasaran meningkatnya pengetahuan TIK masyarakat diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP TIK). Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 24,785, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 15,785, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 63,69%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang sebesar 13,233, maka capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan persentase sebesar 119,29%, yang mengindikasikan adanya perkembangan dalam pemanfaatan dan pengetahuan TIK di masyarakat. Namun demikian, realisasi tahun 2025 tersebut masih berada di bawah target akhir RPJMD tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 24,785, dengan tingkat capaian 63,69%, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan melalui penguatan literasi digital, perluasan akses teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara produktif.



Sasaran 4: Meningkatnya Pengetahuan Tik Masyarakat								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
IP TIK	Jumlah	24,785	15,785	63,69	13,233	119,29	24,785	63,69

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital masyarakat serta pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai sektor pembangunan menjadi salah satu fokus penting dalam kebijakan pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui berbagai perangkat daerah terus melaksanakan kegiatan edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang teknologi informasi. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyelenggaraan Mimika Innovation Week 2025, yang menghadirkan berbagai kegiatan seminar dan diskusi terkait pengembangan inovasi daerah serta pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan dan pembangunan daerah. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan seminar yang membahas peran guru dalam menghadapi era digital, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari proses pembelajaran.



Gambar 3.4.

Mimika Innovation Week 2025, Bappeda Gelar Seminar Peran Guru di Era Digital



Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan aplikasi digital bagi masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta aparatur pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi juga dilakukan melalui kegiatan pelatihan pengelolaan website bagi operator perangkat daerah. Melalui kegiatan pelatihan tersebut, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola informasi digital serta menyajikan informasi publik melalui media berbasis internet secara lebih efektif dan transparan. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat serta mendorong penerapan prinsip keterbukaan informasi publik.

Selain peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, pengembangan literasi digital masyarakat juga menjadi perhatian penting dalam pembangunan sektor teknologi informasi di Kabupaten Mimika. Literasi digital masyarakat yang baik akan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi secara produktif, baik dalam kegiatan pendidikan, ekonomi, maupun dalam memperoleh informasi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi digital masyarakat serta memperluas pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai sektor pembangunan. Peningkatan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai IP TIK pada tahun-tahun mendatang serta mendukung terwujudnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan literasi digital, seminar inovasi daerah, serta pelatihan pemanfaatan teknologi informasi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan sistem informasi pemerintahan melalui pelatihan pengelolaan website bagi operator perangkat daerah guna mendukung penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan peningkatan keterbukaan informasi publik.

Faktor Pendorong

1. Komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
2. Pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi digital bagi masyarakat dan tenaga pendidik
3. Dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengembangan sistem informasi daerah
4. Pelaksanaan pelatihan pengelolaan website dan aplikasi digital bagi aparatur pemerintah daerah
5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aktivitas



Faktor Penghambat

1. Keterbatasan akses jaringan internet pada beberapa wilayah di Kabupaten Mimika
2. Masih rendahnya tingkat literasi digital masyarakat pada beberapa kelompok masyarakat
3. Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi pada beberapa wilayah
4. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi
5. Belum meratanya pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor pembangunan

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan program literasi digital bagi masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi
2. Memperluas akses jaringan internet di berbagai wilayah Kabupaten Mimika
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan sistem informasi dan layanan digital
4. Mengembangkan inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi
5. Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik

3.3.5. Sasaran 5 “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan”

3.3.5.1. IKU 5 : Indeks Pembangunan Gender

Sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 13,4, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 9,7, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 72,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang sebesar 3,3, maka capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dengan persentase sebesar 293,94%, yang mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Namun demikian, realisasi tahun 2025 tersebut masih berada di bawah target akhir RPJMD tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 13,4, dengan tingkat capaian 72,39%, sehingga masih diperlukan penguatan kebijakan dan program pengarusutamaan gender, peningkatan akses dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki, serta integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sasaran 5: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
IPG	Indeks	13,4	9,7	72,39	3,3	293,94	13,4	72,39

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah telah mempertimbangkan perspektif gender secara adil dan setara. Melalui penerapan strategi pengarusutamaan gender, diharapkan laki-laki dan perempuan dapat memperoleh akses,



partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara dalam setiap proses pembangunan. Dalam rangka mendorong penerapan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi perangkat daerah serta masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya integrasi perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan.

Kegiatan sosialisasi PUG tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya penerapan prinsip kesetaraan gender dalam pembangunan daerah. Dengan meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap konsep pengarusutamaan gender, diharapkan kebijakan dan program pembangunan yang disusun dapat lebih responsif terhadap kebutuhan laki-laki maupun perempuan. Selain itu, upaya peningkatan pengarusutamaan gender juga dilakukan melalui kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan organisasi perempuan di Kabupaten Mimika. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai organisasi perempuan yang berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan di daerah. Penguatan kapasitas kelembagaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Mimika juga mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah seminar perempuan adat Papua, yang bertujuan untuk memperkuat peran perempuan adat dalam menjaga nilai-nilai budaya serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan sosial dan budaya di daerah. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelestarian budaya, penguatan ketahanan keluarga, serta pembangunan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, penguatan kapasitas organisasi perempuan, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan sosial dan budaya, Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya mendorong penerapan prinsip kesetaraan gender dalam pembangunan daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan melalui kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada perangkat daerah, peningkatan kapasitas organisasi perempuan, serta dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan di masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan melalui penguatan peran organisasi perempuan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

**Faktor Pendorong**

1. Komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penerapan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Gender kepada perangkat daerah dan masyarakat
3. Dukungan organisasi perempuan dalam mendorong pemberdayaan perempuan di daerah
4. Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan organisasi perempuan
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan

Faktor Penghambat

1. Masih terbatasnya pemahaman mengenai konsep pengarusutamaan gender pada beberapa perangkat daerah
2. Keterbatasan kapasitas kelembagaan organisasi perempuan pada beberapa wilayah
3. Masih adanya kesenjangan partisipasi perempuan dalam beberapa sektor pembangunan
4. Keterbatasan data terpilah gender yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan
5. Faktor sosial dan budaya yang masih mempengaruhi peran perempuan dalam pembangunan

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender bagi perangkat daerah
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan organisasi perempuan di Kabupaten Mimika
3. Mendorong integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
4. Mengembangkan sistem data terpilah gender untuk mendukung perencanaan pembangunan yang responsif gender
5. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan daerah

3.3.6. Sasaran 6 “Menurunnya Tingkat Kemiskinan”**3.3.6.1. IKU 6 : Angka Kemiskinan**

Sasaran menurunnya tingkat kemiskinan diukur melalui indikator angka kemiskinan. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 23,3 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 13,70 persen, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 170,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penurunan tingkat kemiskinan telah melampaui target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 sebesar 14,18 persen, maka pada tahun 2025 terjadi penurunan tingkat kemiskinan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,50 persen, yang mencerminkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, capaian tahun 2025 tersebut juga telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 23,3 persen, dengan tingkat capaian 170,07 persen, sehingga menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah memberikan hasil yang positif.



Sasaran 6: Menurunnya Tingkat Kemiskinan								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Angka Kemiskinan	Persen	23,3	13,70	170,07	14,18	103,50	23,3	170,07

Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah terus mendorong sinergi lintas perangkat daerah dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan terarah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan paparan strategi penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mimika. Kegiatan tersebut bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Melalui kegiatan ini, berbagai perangkat daerah didorong untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga terus mendorong sinergi dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan. Melalui forum koordinasi pembangunan daerah, pemerintah daerah membahas arah kebijakan pembangunan serta berbagai strategi inovatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.



Gambar 3.5.

Dinsos Gelar Paparan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Mimika



Upaya penurunan kemiskinan juga dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga. Salah satu program yang dilaksanakan adalah melalui kegiatan program Bangga Kencana yang dilaksanakan di tingkat masyarakat melalui Posyandu. Program ini tidak hanya berfokus pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, serta ketahanan ekonomi keluarga.

Selain program pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mimika juga melaksanakan berbagai program bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, salah satunya melalui penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat di berbagai distrik. Program bantuan sosial ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga masyarakat yang berada pada kelompok rentan dan miskin. Penyaluran bantuan sosial tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial serta memastikan bahwa masyarakat yang berada pada kondisi rentan tetap memperoleh perlindungan sosial yang memadai. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga risiko jatuhnya masyarakat ke dalam kondisi kemiskinan yang lebih dalam dapat di minimalisir.

Dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, diharapkan angka kemiskinan di daerah ini dapat terus menurun secara bertahap pada tahun-tahun mendatang. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar akan terus menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program pemberdayaan keluarga melalui program Bangga Kencana, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah guna mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Faktor Pendorong

1. Komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui berbagai program pembangunan
2. Koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan
3. Pelaksanaan program pemberdayaan keluarga melalui program Bangga Kencana
4. Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan
5. Dukungan program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan

Faktor Penghambat

1. Kesenjangan ekonomi antarwilayah di Kabupaten Mimika
2. Keterbatasan akses ekonomi masyarakat di beberapa wilayah pedalaman



3. Ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial
4. Keterbatasan kesempatan kerja pada beberapa sektor ekonomi
5. Kondisi geografis wilayah yang mempengaruhi distribusi bantuan dan program pembangunan

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi lintas perangkat daerah
2. Memperluas program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal
3. Meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial bagi masyarakat miskin
4. Mengembangkan program peningkatan keterampilan masyarakat untuk mendukung kesempatan kerja
5. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah

3.3.7. Sasaran 7 "Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat"

3.3.7.1. IKU 7 : Angka Kriminalitas

Sasaran meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat diukur melalui indikator angka kriminalitas. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 440 kasus, sedangkan realisasi yang tercatat sebesar 460 kasus, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 95,65 persen. Meskipun realisasi tersebut masih sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang mencapai 500 kasus, angka kriminalitas pada tahun 2025 menunjukkan penurunan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 108,70 persen, yang menandakan adanya perbaikan kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sementara itu, terhadap target akhir RPJMD tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 440 kasus, capaian realisasi tahun 2025 berada pada tingkat 95,65 persen, sehingga masih diperlukan penguatan upaya pencegahan dan penanganan tindak kriminal melalui peningkatan koordinasi antar instansi, partisipasi masyarakat, serta penguatan sistem keamanan lingkungan.

Sasaran 7: Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Angka Kriminalitas	Kasus	440	460	95,65	500	108,70	440	95,65

Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Kondisi keamanan yang kondusif akan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih baik di daerah. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mimika terus mendorong upaya deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan di wilayah masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)



yang membahas strategi deteksi dini terhadap berbagai ancaman keamanan di Kabupaten Mimika. Melalui kegiatan tersebut, berbagai pihak yang terlibat dalam menjaga keamanan daerah, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat, dapat melakukan koordinasi dan berbagi informasi terkait potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi di masyarakat.

Selain upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, Pemerintah Kabupaten Mimika juga terus memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika. Penyusunan dokumen RPB tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dapat diminimalisir.

Selain itu, BPBD Kabupaten Mimika juga melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana yang bertugas untuk melakukan penanganan cepat terhadap berbagai kejadian darurat di masyarakat. Peningkatan kapasitas tim tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk merespon berbagai situasi darurat secara cepat dan efektif. Upaya peningkatan keamanan masyarakat juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi penilaian Indeks Ketahanan Daerah yang dilaksanakan di wilayah Tanah Papua. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman berbagai pemangku kepentingan mengenai pentingnya ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman, baik ancaman sosial, ekonomi, maupun bencana alam. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sistem ketahanan daerah serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.



Gambar 3.6.

FKDM Gelar FGD Bahas Deteksi Dini Ancaman Keamanan di Mimika

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman, tertib, dan kondusif. Penguatan sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan



masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Mimika.

Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana daerah, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan forum diskusi deteksi dini ancaman keamanan, penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah, serta peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat dalam menangani berbagai situasi darurat di masyarakat.

Faktor Pendorong

1. Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Dukungan aparat keamanan dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan daerah
3. Pelaksanaan kegiatan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan melalui FKDM
4. Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana melalui BPBD
5. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait

Faktor Penghambat

1. Masih adanya potensi gangguan keamanan di beberapa wilayah masyarakat
2. Keterbatasan sumber daya dalam pengawasan keamanan di wilayah yang luas
3. Kondisi geografis wilayah yang mempengaruhi kecepatan penanganan situasi darurat
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung keamanan dan penanggulangan bencana
5. Belum meratanya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan masyarakat
2. Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana dan situasi darurat
4. Mengembangkan sistem ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan

3.3.8. Sasaran 8 "Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat"

3.3.8.1. IKU 8 : Indeks Gotong Royong

Sasaran meningkatnya kerukunan hidup masyarakat diukur melalui indikator Indeks Gotong Royong. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 0,58, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,51, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 87,93 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerukunan dan partisipasi sosial masyarakat sudah mengalami perkembangan, meskipun masih berada di bawah target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) yang sebesar 0,48, maka



realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan dengan tingkat capaian sebesar 106,25 persen, yang mencerminkan adanya penguatan nilai kebersamaan dan semangat gotong royong di masyarakat. Sementara itu, terhadap target akhir RPJMD tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 0,58, capaian realisasi tahun 2025 berada pada tingkat 87,93 persen, sehingga masih diperlukan upaya berkelanjutan melalui penguatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan komunitas, serta pengembangan kegiatan sosial yang mendorong solidaritas dan kerukunan antar warga.

Sasaran 8: Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indeks Gotong Royong	Indeks	0,58	0,51	87,93	0,48	106,25	0,58	87,93

Upaya untuk memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah berbagai festival budaya dan kegiatan seni tradisional yang bertujuan untuk memperkuat nilai kebersamaan serta mempererat hubungan antar masyarakat. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti Festival Budaya Amungme dan Kamoro, yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas budaya sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya lokal, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar kelompok masyarakat.

**Gambar 3.7.**

Disparbudpora Mimika Gelar Festival Budaya Amungme dan Kamoro 2025

Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan berbagai kegiatan olahraga dan seni budaya yang melibatkan masyarakat dari berbagai distrik, seperti festival lomba dayung tradisional antar distrik pesisir serta berbagai kegiatan pentas seni budaya daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi sarana interaksi sosial yang dapat memperkuat nilai gotong royong dan solidaritas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mimika terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya melalui penyelenggaraan festival budaya, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan seni dan budaya yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

Faktor Pendorong

1. Keberagaman budaya masyarakat yang menjadi kekuatan sosial dalam membangun solidaritas
2. Dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan sosial dan budaya
3. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kebudayaan daerah
4. Pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi kebersamaan

Faktor Penghambat

1. Perbedaan latar belakang sosial dan budaya masyarakat yang beragam
2. Keterbatasan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara luas
3. Pengaruh perkembangan sosial yang dapat mengurangi nilai gotong royong

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan kegiatan sosial budaya yang melibatkan masyarakat secara luas
2. Mendorong pelestarian nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat
3. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal



3.3.8.2. IKU 9 : Indeks Rasa Aman

Sasaran meningkatnya kerukunan hidup masyarakat juga diukur melalui indikator Indeks Rasa Aman. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 0,69, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,57, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 82,61 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat rasa aman masyarakat masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang sebesar 0,59, maka realisasi tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dengan tingkat capaian sebesar 96,61 persen, yang mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap rasa aman masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, terhadap target akhir RPJMD tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 0,69, capaian realisasi tahun 2025 berada pada tingkat 82,61 persen, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut melalui penguatan keamanan lingkungan, peningkatan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal.

Sasaran 8: Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indeks Rasa Aman	Indeks	0,69	0,57	82,61	0,59	96,61	0,69	82,61

Dalam rangka meningkatkan rasa aman masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mimika terus mendorong terciptanya stabilitas sosial melalui penguatan kerukunan antar kelompok masyarakat serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan kerukunan umat beragama di Kabupaten Mimika. Pemerintah daerah terus mendorong Mimika sebagai kota harmoni yang menjunjung tinggi nilai toleransi serta hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman agama dan budaya masyarakat. Selain itu, berbagai kegiatan keagamaan dan budaya juga dilaksanakan untuk memperkuat hubungan antar umat beragama di Kabupaten Mimika. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Pesparani II Papua Tengah, yang menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk mempererat persaudaraan melalui kegiatan keagamaan dan budaya.

**Gambar 3.8.**

Mimika Perkuat Visi sebagai Kota Harmoni Lewat Kerukunan Umat Beragama

Kegiatan keagamaan dan budaya seperti ini tidak hanya memperkuat kehidupan spiritual masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis antar kelompok masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mimika terus memperkuat upaya peningkatan rasa aman masyarakat melalui penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Faktor Pendorong

1. Kerukunan umat beragama yang terjaga dengan baik
2. Dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial
3. Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang mempererat hubungan masyarakat
4. Komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan kota yang harmonis

Faktor Penghambat

1. Potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat perbedaan latar belakang masyarakat
2. Tantangan menjaga stabilitas sosial di wilayah yang memiliki keberagaman tinggi
3. Pengaruh dinamika sosial yang dapat mempengaruhi hubungan antar masyarakat

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan dialog lintas agama dan budaya di masyarakat
2. Memperkuat kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
3. Mendorong kegiatan sosial yang mempererat hubungan masyarakat



3.3.8.3. IKU 10 : Indeks Toleransi

Sasaran meningkatnya kerukunan hidup masyarakat juga diukur melalui indikator Indeks Toleransi. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 0,58, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,55, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 94,83 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat toleransi di masyarakat telah mendekati target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang sebesar 0,48, maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan dengan tingkat capaian sebesar 114,58 persen, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan di tengah masyarakat. Sementara itu, terhadap target akhir RPJMD tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 0,58, capaian realisasi tahun 2025 berada pada tingkat 94,83 persen, sehingga masih diperlukan upaya berkelanjutan melalui penguatan nilai toleransi, dialog antar kelompok masyarakat, serta kegiatan sosial yang mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan rukun.

Sasaran 8: Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indeks Toleransi	Indeks	0,58	0,55	94,83	0,48	114,58	0,58	94,83

Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya memperkuat nilai toleransi di masyarakat melalui berbagai kegiatan budaya dan keagamaan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah berbagai festival budaya dan kegiatan seni tradisional, yang menjadi wadah bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berinteraksi dan memperkuat hubungan sosial.



Gambar 3.9.

Pesparani II Jadi Momentum Perayaan Iman dan Persaudaraan



Selain itu, pemerintah daerah juga mendukung berbagai kegiatan pelatihan seni dan budaya bagi generasi muda, seperti pelatihan kesenian tradisional bagi pelajar serta kegiatan pentas seni budaya daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat identitas budaya masyarakat sekaligus menanamkan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan sejak dini kepada generasi muda. Melalui berbagai kegiatan budaya dan keagamaan tersebut, diharapkan masyarakat Kabupaten Mimika dapat terus menjaga keharmonisan sosial serta memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman. Pemerintah Kabupaten Mimika terus mendorong peningkatan nilai toleransi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan budaya, keagamaan, serta pelatihan seni budaya bagi generasi muda yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan budaya.

Faktor Pendorong

1. Keberagaman budaya dan agama yang menjadi kekuatan sosial masyarakat
2. Dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan budaya dan keagamaan
3. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya
4. Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menjaga toleransi.

Faktor Penghambat

1. Perbedaan latar belakang sosial dan budaya masyarakat
2. Potensi kesalahpahaman antar kelompok masyarakat
3. Keterbatasan kegiatan yang mendorong interaksi lintas budaya

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang
2. Memperkuat pendidikan toleransi dan nilai kebinekaan di masyarakat
3. Mendorong partisipasi generasi muda dalam kegiatan budaya dan sosial masyarakat

3.3.9.Sasaran 9 "Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman, Perhubungan, dan Perekonomian"**3.3.9.1.IKU 11 : Rasio Infrastruktur Berfungsi Baik**

Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman, perhubungan, dan perekonomian diukur melalui indikator rasio infrastruktur berfungsi baik. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 51 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 43,15 persen, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 84,61 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur yang berfungsi dengan baik masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang sebesar 42 persen, maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan dengan tingkat capaian sebesar 102,74 persen, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas dan fungsi infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian. Sementara itu, terhadap target akhir RPJMD tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 51 persen, capaian realisasi tahun 2025 berada pada tingkat 84,61 persen, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan guna mendukung konektivitas wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sasaran 9: Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Pemukiman, Perhubungan Dan Perekonomian								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Rasio Infrastruktur berfungsi baik	Persen	51	43,15	84,61	42	102,74	51	84,61

Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur melalui perencanaan pembangunan yang lebih terarah serta berbasis kebutuhan wilayah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Baru Kabupaten Mimika yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Penyusunan dokumen RDTR tersebut bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang secara lebih terencana sehingga pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan maupun kawasan pengembangan baru dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Penyusunan RDTR juga menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mimika dapat mendukung pertumbuhan kawasan permukiman, pengembangan wilayah ekonomi baru, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai fasilitas publik. Dengan adanya perencanaan tata ruang yang lebih jelas, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mimika dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat.



Gambar 3.10.

Dinas PUPR Mimika Gelar Konsultasi Publik I Penyusunan RDTR Kota Baru Kabupaten Mimika

Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan peningkatan kualitas infrastruktur melalui perencanaan tata ruang yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur baru, serta pemeliharaan infrastruktur yang telah tersedia agar dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.



Faktor Pendorong

1. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah
2. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang sebagai dasar pengembangan wilayah
3. Dukungan perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur
4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur daerah
2. Kondisi geografis wilayah yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur
3. Kebutuhan pemeliharaan infrastruktur yang cukup besar
4. Proses perencanaan dan pembangunan yang memerlukan waktu yang cukup panjang

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
2. Mengoptimalkan pemanfaatan dokumen tata ruang dalam perencanaan pembangunan
3. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam pembangunan infrastruktur
4. Mendorong pengembangan kawasan baru yang didukung infrastruktur yang memadai.

3.3.9.2. IKU 12 : Rasio Ketersediaan Infrastruktur

Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman, perhubungan, dan perekonomian juga diukur melalui indikator rasio ketersediaan infrastruktur. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 70 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 61,2 persen, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 87,43 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur yang mendukung aktivitas pemukiman, transportasi, dan perekonomian masyarakat masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang sebesar 60 persen, maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan dengan tingkat capaian sebesar 102,00 persen, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam penyediaan infrastruktur di daerah. Sementara itu, terhadap target akhir RPJMD tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 70 persen, capaian realisasi tahun 2025 berada pada tingkat 87,43 persen, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan melalui pembangunan, pengembangan, serta pemerataan infrastruktur secara berkelanjutan guna mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran 9: Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Pemukiman, Perhubungan Dan Perekonomian								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Rasio ketersediaan Infrastruktur	Persen	70	61,2	87,43	60	102,00	70	87,43

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan infrastruktur serta mendukung pembangunan daerah berbasis teknologi, Pemerintah Kabupaten Mimika juga terus mendorong penerapan konsep *Smart City* dalam pengelolaan pembangunan daerah. Melalui pelaksanaan Rapat *Smart City* III, pemerintah daerah membahas berbagai strategi pengembangan kota berbasis



teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan infrastruktur serta kualitas layanan publik kepada masyarakat. Penerapan konsep *Smart City* di Kabupaten Mimika diharapkan dapat mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan infrastruktur perkotaan, seperti sistem transportasi, layanan publik, serta pengelolaan fasilitas kota secara lebih modern dan terintegrasi. Selain itu, pengembangan *Smart City* juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah berbasis inovasi dan teknologi.



Gambar 3.11.

Diskominfo Mimika Gelar Rapat Smart City III

Pemerintah Kabupaten Mimika terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur melalui pembangunan berbagai fasilitas publik, pengembangan wilayah baru, serta penerapan konsep *Smart City* dalam pengelolaan pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan konektivitas wilayah.

Faktor Pendorong

1. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur
2. Pengembangan konsep *Smart City* dalam pembangunan daerah
3. Dukungan perangkat daerah dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur
4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang memadai.

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur daerah
2. Kondisi geografis wilayah yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur
3. Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat
4. Keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan infrastruktur berbasis teknologi.

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah
2. Mengembangkan sistem pengelolaan infrastruktur berbasis teknologi melalui *Smart City*



3. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pembangunan infrastruktur.
4. Mendorong investasi pembangunan infrastruktur daerah.

3.3.10. Sasaran 10 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

3.3.10.1. IKU 13 : IKLH

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 85 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 87,97 persen, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 103,49 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah melampaui target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang sebesar 82,12 persen, maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan dengan tingkat capaian sebesar 107,12 persen, yang mencerminkan adanya perbaikan kondisi lingkungan hidup di daerah. Selain itu, terhadap target akhir RPJMD tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 85 persen, realisasi tahun 2025 telah melampaui target dengan tingkat capaian 103,49 persen, sehingga menunjukkan bahwa berbagai upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup telah memberikan hasil yang positif dalam menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
IKLH	Persen	85	87,97	103,49	82,12	107,12	85	103,49

Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Mimika tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih baik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peluncuran berbagai program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada pengurangan sampah dan peningkatan kesadaran lingkungan.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah program pengelolaan sampah berbasis koin digital yang disosialisasikan kepada masyarakat di tingkat distrik. Program ini merupakan inovasi pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam memilah dan mengelola sampah rumah tangga. Melalui sistem insentif berbasis digital, masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dapat memperoleh manfaat ekonomi sehingga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melalui program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat distrik dan kampung, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mendorong penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.



Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan kondisi lingkungan di Kabupaten Mimika dapat terus terjaga serta mendukung terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan.



Gambar 3.12.

Pemkab Mimika Luncurkan Program Mitra Hijau dan Sosialisasi Indeks Respon Lingkungan Hidup 2025

Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui penguatan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, serta penerapan berbagai inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pelaksanaan program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta penerapan inovasi dalam pengelolaan sampah dan pengurangan pencemaran lingkungan.

Faktor Pendorong

1. Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup
2. Pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat
3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan
4. Dukungan berbagai perangkat daerah dalam pelaksanaan program lingkungan hidup
5. Penerapan inovasi dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan

Faktor Penghambat

1. Masih adanya perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menjaga lingkungan
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di beberapa wilayah



3. Peningkatan volume sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk
4. Keterbatasan sumber daya dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan program edukasi lingkungan kepada masyarakat
2. Memperluas penerapan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat
3. Mengembangkan inovasi pengelolaan lingkungan berbasis teknologi
4. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan

3.3.11. Sasaran 11 “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi”

3.3.11.1. IKU 14: Nilai SAKIP

Sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi diukur melalui indikator nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah predikat B, sedangkan realisasi yang dicapai memperoleh nilai 57,11 dengan tingkat capaian kinerja terhadap target sebesar 95,18 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang berada pada predikat CC, maka capaian tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dalam penerapan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan kinerja organisasi. Meskipun demikian, capaian tersebut masih belum sepenuhnya mencapai target akhir RPJMD tahun 2025 yang ditetapkan pada predikat B, dengan tingkat capaian sebesar 95,18 persen, sehingga masih diperlukan penguatan implementasi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, serta penguatan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja agar akuntabilitas kinerja pemerintah dapat semakin optimal.

Sasaran 11: Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Reformasi Birokrasi								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Nilai SAKIP	Predikat	B	57,11	95,18	CC	95,18	B	95,18

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui sosialisasi penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya pengelolaan kinerja yang terintegrasi. Selain itu, Bappeda Kabupaten Mimika juga mendorong penguatan perencanaan pembangunan berbasis data melalui pemanfaatan sistem perencanaan daerah yang mendukung integrasi perencanaan multisektoral. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sehingga lebih tepat sasaran dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

**Gambar 3.13.**

Bappeda Mimika Gelar Sosialisasi SIPETERTATOR, Dorong Perencanaan Multisektoral Berbasis Data

Pemerintah Kabupaten Mimika juga terus meningkatkan transparansi informasi publik melalui penguatan sistem pelayanan informasi berbasis digital. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan kanal layanan Mimika Center bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, penguatan integritas aparatur sipil negara juga terus dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi terkait pencegahan gratifikasi dan konflik kepentingan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP melalui penguatan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam pengelolaan kinerja, serta penerapan perencanaan pembangunan berbasis data. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan sistem pelayanan informasi publik.

Faktor Pendorong

1. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan
2. Peningkatan kapasitas aparatur melalui sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi SAKIP
3. Pemanfaatan sistem perencanaan pembangunan berbasis data
4. Penguatan transparansi informasi publik melalui sistem pelayanan digital
5. Dukungan perangkat daerah dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja



Faktor Penghambat

1. Masih terdapat perangkat daerah yang belum optimal dalam menerapkan manajemen kinerja
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja
3. Belum optimalnya integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja
4. Perubahan regulasi yang menuntut penyesuaian dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan implementasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah
2. Mengoptimalkan penerapan sistem perencanaan pembangunan berbasis data
3. Meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam pengelolaan kinerja
4. Memperkuat integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja
5. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan

3.3.11.2. IKU 16: Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi juga diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 78, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 44,44, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 56,97 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi masih belum mencapai target yang diharapkan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang sebesar 32,62, maka capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan tingkat capaian sebesar 136,24 persen, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam implementasi kebijakan reformasi birokrasi. Sementara itu, terhadap target akhir RPJMD tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 78, capaian realisasi tahun 2025 berada pada tingkat 56,97 persen, sehingga masih diperlukan upaya penguatan reformasi birokrasi secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran 11: Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Reformasi Birokrasi								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78	44,44	56,97	32,62	136,24	78	56,97

Pemerintah Kabupaten Mimika tetap melaksanakan berbagai program yang mendukung percepatan implementasi reformasi birokrasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara melalui sosialisasi terkait pencegahan gratifikasi dan penghindaran konflik kepentingan. Hal ini merupakan bagian penting dari



upaya menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional. Upaya peningkatan kapasitas aparatur juga dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi serta pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.



Gambar 3.14.

Pemkab Mimika Sosialisasi Penguatan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Faktor Pendorong

1. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi
2. Dukungan kebijakan nasional terkait pelaksanaan reformasi birokrasi
3. Peningkatan kapasitas aparatur melalui berbagai kegiatan pelatihan dan sosialisasi
4. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi reformasi birokrasi
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
3. Belum sepenuhnya terintegrasinya sistem administrasi pemerintahan
4. Proses evaluasi reformasi birokrasi yang memerlukan waktu cukup panjang

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Mengoptimalkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah
4. Memperkuat sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan
5. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

3.3.12. Sasaran 12 "Meningkatnya Profesionalitas Pegawai"

3.3.12.1. IKU 17 : Indeks Profesionalitas Aparatur

Sasaran meningkatnya profesionalitas pegawai diukur melalui indikator Indeks Profesionalitas Aparatur. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 95, sedangkan



realisasi yang dicapai sebesar 72,25, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 76,05 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas aparatur masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang sebesar 68,69, maka capaian tahun 2025 mengalami peningkatan dengan tingkat capaian sebesar 105,18 persen, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam kompetensi, kinerja, dan pengelolaan sumber daya aparatur. Sementara itu, terhadap target akhir RPJMD tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 95, capaian realisasi tahun 2025 berada pada tingkat 76,05 persen, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan melalui pengembangan kompetensi aparatur, peningkatan disiplin dan kinerja pegawai, serta penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan.

Sasaran 12: Meningkatnya Profesionalitas Pegawai								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks	95	72,25	76,05	68,69	105,18	95	76,05

Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, penguatan kompetensi, serta pembinaan kedisiplinan pegawai. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui berbagai program peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur, termasuk pelatihan kepemimpinan bagi pejabat administrator. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan aparatur dalam menjalankan fungsi manajerial di lingkungan organisasi perangkat daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan penyegaran terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalitas aparatur dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap tugas dan kewenangan yang dimiliki dalam mendukung penegakan hukum di daerah. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika adalah dengan terus mendorong peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara melalui berbagai kegiatan pembinaan serta peningkatan kapasitas aparatur. Peningkatan profesionalitas aparatur diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

**Gambar 3.15.**

Pemkab Mimika tingkatkan profesionalisme ASN

Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sehingga mampu mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara optimal. Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur, serta penguatan pembinaan kedisiplinan dan integritas pegawai. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan kemampuan kepemimpinan aparatur melalui berbagai program pelatihan kepemimpinan bagi pejabat struktural.

Faktor Pendorong

1. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur
2. Pelaksanaan berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur
3. Dukungan kelembagaan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian daerah
4. Peningkatan kesadaran aparatur terhadap pentingnya profesionalitas dalam menjalankan tugas pemerintahan

Faktor Penghambat

1. Masih terdapat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur pada beberapa perangkat daerah
2. Belum meratanya kesempatan pengembangan kompetensi bagi seluruh aparatur
3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kompetensi aparatur



Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat struktural
3. Meningkatkan pembinaan kedisiplinan dan integritas aparatur sipil negara
4. Mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kompetensi aparatur
5. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan manajemen kepegawaian

3.3.13. Sasaran 13 "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat"

3.3.13.1. IKU 18 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah predikat A, sedangkan realisasi yang dicapai memperoleh predikat B dengan nilai 81,76, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 85,00 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik telah mengalami perbaikan, namun masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang memperoleh predikat C dengan nilai 74,16, maka capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan tingkat capaian sebesar 110,24 persen, yang mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, terhadap target akhir RPJMD tahun 2025 yang ditetapkan pada predikat A, capaian realisasi tahun 2025 berada pada tingkat 85,00 persen, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan melalui perbaikan sistem pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sasaran 13: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
IKM	Predikat	A	B (81,76)	85,00	C (74,16)	110,24	A	85,00

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai inovasi pelayanan yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengembangan aplikasi pelayanan digital di tingkat distrik, seperti peluncuran aplikasi pelayanan administrasi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mimika juga telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi pusat layanan terpadu bagi masyarakat. Kehadiran Mal Pelayanan Publik ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dengan mengintegrasikan berbagai jenis layanan dari instansi pemerintah dalam satu lokasi pelayanan sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan secara lebih cepat, mudah, dan transparan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan melalui inovasi pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan layanan administrasi dan perpajakan yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti pelayanan yang dilakukan pada kegiatan Car Free Day untuk memberikan kemudahan akses



layanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan serta penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.



Gambar 3.16.

Tingkatkan Kemudahan Layanan Masyarakat, 18 Juni 2025 Pemkab Mimika Luncurkan Mal Pelayanan Publik

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mimika dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan tingkat kepuasan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, serta penyederhanaan prosedur pelayanan agar lebih cepat, mudah, dan transparan. Selain itu, pemerintah daerah juga mengembangkan berbagai bentuk pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat guna meningkatkan aksesibilitas layanan publik.

Faktor Pendorong

1. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi
3. Kehadiran Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah
4. Peningkatan kesadaran perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

Faktor Penghambat

1. Belum meratanya kualitas pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah
2. Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
4. Masih terdapat prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya sederhana dan efisien



Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah
2. Mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital
3. Mengoptimalkan fungsi Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
5. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik

3.3.14. Sasaran 14 “Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat”

3.3.14.1. IKU 19 : Tingkat Pendapatan Masyarakat Per Kapita

Sasaran menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat diukur melalui indikator tingkat pendapatan masyarakat per kapita. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar Rp30.400.000 per kapita, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar Rp31.250.000 per kapita, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 102,80 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat telah melampaui target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang sebesar Rp27.699.000 per kapita, maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan dengan tingkat capaian sebesar 112,82 persen, yang mencerminkan adanya pertumbuhan pendapatan masyarakat. Selain itu, terhadap target akhir RPJMD tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar Rp30.400.000 per kapita, capaian realisasi tahun 2025 telah melampaui target dengan tingkat capaian 102,80 persen, sehingga menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan ekonomi telah memberikan hasil yang positif.

Sasaran 14: Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Tingkat pendapatan masyarakat per kapita	Rp juta/kapita	30.400.000	31.250.000	102,80	27.699.000	112,82	30.400.000	102,80

Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Mimika menunjukkan potensi yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung oleh berbagai sektor ekonomi yang berkembang, khususnya sektor pertambangan, industri, perdagangan, perikanan, serta jasa. Keberadaan industri pertambangan di wilayah Mimika memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi daerah dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat yang bekerja pada sektor formal berpendapatan tinggi dengan masyarakat yang bekerja pada sektor informal atau sektor ekonomi tradisional. Selain itu, berbagai faktor seperti inflasi, keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan dan keterampilan juga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui berbagai program pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesempatan kerja, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan



pendapatan masyarakat secara lebih merata sehingga kesenjangan pendapatan dapat ditekan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui pengembangan sektor ekonomi produktif, peningkatan kesempatan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa guna meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Faktor Pendorong

1. Potensi sumber daya alam yang besar di Kabupaten Mimika
2. Pertumbuhan aktivitas ekonomi di berbagai sektor seperti pertambangan, perdagangan, dan jasa
3. Dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi daerah
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat

Faktor Penghambat

1. Masih adanya kesenjangan kesempatan kerja antara masyarakat
2. Ketergantungan ekonomi daerah pada sektor tertentu
3. Keterbatasan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia
4. Dampak inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat

Rencana Tindak Lanjut

1. Mendorong pengembangan sektor ekonomi produktif berbasis potensi daerah
2. Meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
3. Meningkatkan pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesempatan kerja
4. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas
5. Meningkatkan investasi daerah guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat

3.3.15. Sasaran 15 “Meningkatnya Kesempatan Kerja”**3.3.15.1. IKU 20 : Tingkat Pengangguran Kerja**

Sasaran meningkatnya kesempatan kerja diukur melalui indikator tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 7,45 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 6,75 persen, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 110,38 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berhasil ditekan hingga berada di bawah target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang sebesar 7,34 persen, maka pada tahun 2025 terjadi penurunan tingkat pengangguran dengan tingkat capaian sebesar 108,77 persen, yang mencerminkan adanya peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selain itu, terhadap target akhir RPJMD tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 7,45 persen, capaian realisasi tahun 2025 telah melampaui target dengan tingkat capaian 110,38 persen, sehingga menunjukkan bahwa berbagai upaya dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor ekonomi daerah telah memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja.



Sasaran 15: Meningkatnya Kesempatan Kerja								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Tingkat pengangguran kerja	Persen	7,45	6,75	110,38	7,34	108,77	7,45	110,38

Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kerajinan daerah yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Mimika. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pengrajin serta membuka peluang usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja di masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal melalui penguatan sektor kerajinan daerah. Pengembangan sektor ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan budaya lokal tetapi juga untuk menciptakan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.



Gambar 3.17.

Dekranasda Mimika Gelar Workshop dan Pelatihan Kerajinan

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kesempatan kerja di Kabupaten Mimika dapat terus meningkat sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan sektor ekonomi produktif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemberdayaan usaha mikro dan ekonomi kreatif. Selain itu,



pemerintah daerah juga mendorong pengembangan usaha berbasis potensi lokal yang dapat menyerap tenaga kerja masyarakat.

Faktor Pendorong

1. Potensi ekonomi daerah yang didukung oleh berbagai sektor usaha seperti jasa, perdagangan, dan kerajinan
2. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dalam berbagai sektor ekonomi
3. Dukungan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat
4. Komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal

Faktor Penghambat

1. Masih tingginya proporsi tenaga kerja pada sektor informal
2. Keterbatasan keterampilan tenaga kerja pada sebagian masyarakat
3. Ketidakesesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi tenaga kerja
4. Terbatasnya lapangan kerja pada beberapa sektor ekonomi

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan program pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja
2. Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penyerap tenaga kerja
3. Mengembangkan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
4. Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam penciptaan lapangan kerja
5. Memperluas akses masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi

3.3.16. Sasaran 16 "Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN"

3.3.16.1. IKU 21 : Nilai Investasi (PMA/PMDN)

Sasaran meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN diukur melalui indikator nilai investasi (PMDN/PMA). Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar Rp70 triliun, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar Rp28,5 triliun, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 40,71 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang sebesar Rp33 triliun, maka capaian tahun 2025 mengalami penurunan dengan tingkat capaian sebesar 86,36 persen, yang mengindikasikan adanya perlambatan dalam realisasi investasi di daerah. Sementara itu, terhadap target akhir RPJMD tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar Rp70 triliun, capaian realisasi tahun 2025 berada pada tingkat 40,71 persen, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian regulasi, serta penguatan promosi investasi guna menarik minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sasaran 16: Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Rp Triliun	70	28,5	40,71	33	86,36	70	40,71



Secara umum, Kabupaten Mimika memiliki potensi investasi yang cukup besar terutama pada sektor pertambangan, konstruksi, perdagangan, dan jasa. Keberadaan industri pertambangan besar di wilayah Mimika juga memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi daerah. Perusahaan pertambangan besar yang beroperasi di wilayah Mimika juga terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat melalui berbagai program investasi dan pengembangan masyarakat. Selain itu, beberapa indikator ekonomi menunjukkan adanya potensi peningkatan investasi di Kabupaten Mimika. Salah satunya adalah penurunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang membuat biaya pembangunan menjadi lebih efisien sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi di sektor konstruksi dan infrastruktur. Penurunan IKK ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi logistik, akses material, serta konektivitas wilayah yang menjadi faktor penting dalam menarik minat investor. Dalam rangka meningkatkan nilai investasi daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Forum Group Discussion (FGD) penetapan kebijakan pemberian fasilitas penanaman modal yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong peningkatan investasi di daerah.



Gambar 3.18.

DPMPTSP Mimika Gelar FGD Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat ekosistem investasi daerah. Dengan adanya kebijakan yang mendukung investasi serta pelayanan perizinan yang lebih efektif dan efisien, diharapkan minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Mimika dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai investasi daerah melalui penyederhanaan perizinan usaha, peningkatan kualitas pelayanan investasi, serta penyusunan kebijakan yang mendukung penanaman modal. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan promosi potensi investasi



daerah kepada para investor serta memperkuat koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Faktor Pendorong

1. Potensi sumber daya alam yang besar di Kabupaten Mimika
2. Dukungan sektor pertambangan dan industri yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah
3. Perbaikan kondisi infrastruktur dan konektivitas wilayah
4. Penurunan biaya konstruksi yang dapat meningkatkan daya tarik investasi

Faktor Penghambat

1. Fluktuasi kondisi ekonomi global yang mempengaruhi minat investasi
2. Ketergantungan investasi pada sektor tertentu
3. Keterbatasan infrastruktur pendukung pada beberapa wilayah
4. Masih terdapat hambatan administratif dalam proses perizinan usaha

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan promosi potensi investasi daerah kepada investor
2. Menyederhanakan proses perizinan investasi melalui pelayanan terpadu
3. Mengembangkan sektor ekonomi potensial yang dapat menarik investasi baru
4. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha
5. Mengoptimalkan kebijakan pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal

3.3.17. Sasaran 17 “Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Berbasis Sektor Pertanian dan Perdagangan”**3.3.17.1. IKU 21 : Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perdagangan**

Sasaran meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan diukur melalui indikator persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perdagangan. Pada tahun 2025, sektor pertanian ditargetkan tumbuh sebesar 0,5 persen, namun realisasi yang dicapai mengalami kontraksi sebesar -3,54 persen, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tercatat -708 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang sebesar 4 persen, maka capaian tahun 2025 menunjukkan penurunan dengan tingkat capaian sebesar -88,50 persen, yang mengindikasikan adanya pelemahan kinerja sektor pertanian. Sementara itu, pada sektor perdagangan, target pertumbuhan yang ditetapkan sebesar 4 persen dengan realisasi sebesar 1,79 persen, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target mencapai 44,75 persen. Namun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 yang sebesar 0,55 persen, maka pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan tingkat capaian sebesar 325,45 persen. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2025, capaian sektor pertanian masih berada jauh di bawah target, sedangkan sektor perdagangan juga belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga diperlukan upaya penguatan sektor unggulan melalui peningkatan produktivitas pertanian, penguatan rantai pasok, serta pengembangan sektor perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih optimal.



Sasaran 17: Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Berbasis Sektor Unggulan								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian & perdagangan	Persen	Pertanian:	Pertanian:	Pertanian:	Pertanian:	Pertanian:	Pertanian:	Pertanian:
		0,5	-3,54	-708	4	-88,50	0,5	-708
		Perdagangan:	Perdagangan:	Perdagangan:	Perdagangan:	Perdagangan:	Perdagangan:	Perdagangan:
		4	1,79	44,75	0,55	325,45	4	44,75

Pemerintah Kabupaten Mimika terus mendorong penguatan sektor-sektor ekonomi potensial sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, pemerintah menekankan pentingnya pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal guna memperkuat daya saing perekonomian daerah serta meningkatkan kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perdagangan dan jasa. Berbagai kegiatan promosi produk unggulan daerah juga dilakukan melalui partisipasi dalam pameran ekonomi kreatif di tingkat nasional yang bertujuan untuk memperkenalkan potensi ekonomi daerah kepada pasar yang lebih luas.



Gambar 3.19.

Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Jadi Fokus Penyusunan RKPD Pemkab Mimika Tahun 2025

Upaya lain yang dilakukan adalah melalui kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif guna meningkatkan kualitas produk serta memperkuat daya saing pelaku usaha lokal. Dengan penguatan sektor-sektor tersebut,



diharapkan aktivitas ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, serta ekonomi kreatif. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong promosi produk unggulan daerah dan peningkatan kapasitas pelaku usaha guna meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Faktor Pendorong

1. Potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal yang cukup besar
2. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor unggulan
3. Pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang dapat mendorong aktivitas perdagangan
4. Peningkatan promosi produk unggulan daerah melalui berbagai kegiatan pameran ekonomi

Faktor Penghambat

1. Produktivitas sektor pertanian yang masih relatif rendah
2. Keterbatasan infrastruktur pendukung pada beberapa wilayah
3. Fluktuasi kondisi ekonomi yang mempengaruhi aktivitas perdagangan
4. Keterbatasan akses pasar bagi sebagian pelaku usaha lokal

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pengembangan komoditas pertanian unggulan daerah
2. Mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha pada sektor perdagangan dan ekonomi kreatif
3. Mengembangkan promosi produk unggulan daerah pada tingkat regional dan nasional
4. Memperkuat dukungan infrastruktur ekonomi yang mendukung aktivitas produksi dan distribusi
5. Mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan

3.3.18. Sasaran 18 "Meningkatnya Akselerasi Pertumbuhan Sentra-Sentra Ekonomi di Pedalaman dan Pesisir"**3.3.18.1. IKU 22 : Pertumbuhan Sentra Ekonomi Pedalaman dan Pesisir**

Sasaran meningkatnya akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir diukur melalui indikator pertumbuhan sentra ekonomi pedalaman dan pesisir. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 1 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,65 persen, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 65,00 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di wilayah pedalaman dan pesisir belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Adapun perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 tidak dapat dilakukan karena data realisasi tahun sebelumnya tidak tersedia. Sementara itu, terhadap target akhir RPJMD tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 1 persen, capaian realisasi tahun 2025 berada pada tingkat 65,00 persen, sehingga masih diperlukan upaya penguatan pengembangan wilayah melalui peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta pengembangan potensi unggulan di kawasan pedalaman dan pesisir guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.



Sasaran 18: Meningkatnya Akselerasi Pertumbuhan Sentra-Sentra Ekonomi Di Pedalaman Dan Pesisir								
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target 2025	Realisasi Tahun Sebelumnya (2024)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2025)	% Capaian Kinerja Realisasi 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Pertumbuhan sentra ekonomi pedalaman dan pesisir	Persen	1	0,65	65,00	-	N/A	1	65,00

Pemerintah Kabupaten Mimika tetap melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong pengembangan ekonomi di wilayah pedalaman dan pesisir melalui program pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi kampung, serta pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya alam. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya pusat-pusat kegiatan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan sentra ekonomi di wilayah pedalaman dan pesisir melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat kampung, serta peningkatan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi produktif.

Faktor Pendorong

1. Potensi sumber daya alam yang cukup besar di wilayah pedalaman dan pesisir
2. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi wilayah
3. Program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kampung

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan ketersediaan data dan sistem pengukuran pertumbuhan sentra ekonomi
2. Keterbatasan infrastruktur dasar dan akses transportasi
3. Jarak wilayah yang relatif jauh dari pusat kegiatan ekonomi
4. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan usaha ekonomi lokal

Rencana Tindak Lanjut

1. Mengembangkan sistem pengumpulan dan pengelolaan data kinerja yang lebih terintegrasi
2. Menyusun indikator dan metode pengukuran yang lebih jelas terkait pertumbuhan sentra ekonomi
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di wilayah pedalaman dan pesisir
4. Mendorong pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal
5. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan usaha ekonomi

3.4. Capaian Kinerja Anggaran Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2025

Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian 18 sasaran strategis sebesar Rp6.795.964.066.150,60 dengan realisasi sebesar Rp5.406.849.065.407,53 atau 79,56%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar



program telah dilaksanakan, meskipun masih terdapat beberapa sasaran dengan tingkat realisasi yang relatif rendah sehingga mempengaruhi capaian keseluruhan.

Pada bidang pelayanan dasar, realisasi anggaran untuk sasaran meningkatnya pemerataan kualitas kesehatan masyarakat mencapai 78,06%, sedangkan pada sasaran meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan masyarakat tercatat sebesar 55,38%. Rendahnya realisasi anggaran pada sektor pendidikan terutama dipengaruhi oleh pelaksanaan program pengelolaan pendidikan yang belum optimal. Sementara itu, sasaran meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatnya pengetahuan TIK masyarakat menunjukkan realisasi anggaran yang cukup baik dengan capaian masing-masing 90,60% dan 95,82%.

Pada aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat, realisasi anggaran menunjukkan hasil yang sangat baik. Sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan mencapai 99,75%, menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 93,29%, serta meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat sebesar 97,77%. Selain itu, sasaran meningkatnya kerukunan hidup masyarakat juga menunjukkan realisasi anggaran yang baik yaitu 90,33%, yang mencerminkan pelaksanaan program sosial kemasyarakatan berjalan secara efektif.

Pada sektor pembangunan fisik dan tata kelola pemerintahan, realisasi anggaran pada sasaran infrastruktur permukiman, perhubungan, dan perairan tercatat relatif rendah yaitu 52,15%, yang dipengaruhi oleh beberapa program infrastruktur yang belum terealisasi secara optimal. Sementara itu, realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup mencapai 84,57%, dan sasaran akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi yang memiliki alokasi anggaran terbesar mencapai 86,48%. Adapun realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya profesionalitas pegawai dan meningkatnya kepuasan masyarakat masing-masing sebesar 84,66% dan 92,26%.

Pada aspek penguatan ekonomi daerah, realisasi anggaran menunjukkan capaian yang cukup tinggi. Sasaran menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat, meningkatnya kesempatan kerja, dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan masing-masing mencapai 96,83%, 93,65%, dan 95,79%. Namun demikian, realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN masih relatif lebih rendah yaitu 74,13%, terutama dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pada program perizinan dan pendaftaran perusahaan. Sementara itu, realisasi anggaran pada sasaran pertumbuhan sentra ekonomi pedalaman dan pesisir mencapai 86,62%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar program pengembangan ekonomi wilayah telah terlaksana dengan baik.

Tabel 3.3.
Realisasi Anggaran Per-Sasaran

No	Sasaran Strategis	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	Meningkatnya pemerataan kualitas kesehatan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	540.160.000,00	497.608.000,00	92,12
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	410.014.669.017	319.511.079.873,80	77,93
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.422.391.000	2.937.880.356,00	85,84
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	900.000.000	900.000.000,00	100,00

LAPORAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Mimika
Tahun 2025



No	Sasaran Strategis	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		Jumlah	414.877.220.017	323.846.568.230	78,06
2	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan masyarakat	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	11.072.661.000	8.293.848.987,10	74,90
		Program Pengelolaan Pendidikan	625.729.883.882,00	344.257.635.812,56	55,02
		Program Pengembangan Kurikulum	286.736.000	238.171.700,00	83,06
		Jumlah	637.089.280.882	352.789.656.500	55,38
3	Meningkatkan daya beli masyarakat	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	200.000.000	197.776.340,00	98,89
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.241.604.200	7.923.814.185,00	85,74
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.850.000.000,00	3.838.056.636,00	99,69
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1.000.000.000	988.787.827,00	98,88
		Jumlah	14.291.604.200	12.948.434.988	90,60
4	Meningkatnya pengetahuan TIK masyarakat	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	22.420.000.000	21.871.878.749,00	97,56
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.998.799.050,00	3.442.752.459,00	86,09
		Jumlah	26.418.799.050,00	25.314.631.208,00	95,82
5	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	2.093.237.000	2.089.189.290,00	99,81
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.619.739.700	1.615.661.200,00	99,75
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.000.600.000,00	1.000.000.000,00	99,94
		Program Perlindungan Khusus Anak	159.496.000	154.696.000,00	96,99
		Program Perlindungan Perempuan	1.441.164.000	1.439.192.363,00	99,86
		Jumlah	6.314.236.700	6.298.738.853	99,75
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	3.270.000.000	3.137.600.000,00	95,95
		Program Pemberdayaan Sosial	3.094.558.000,00	2.987.594.908,00	96,54
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	9.674.456.300	9.579.594.015,00	99,02
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	114.749.871.000	105.344.392.660,00	91,80
		Program Rehabilitasi Sosial	23.072.246.000	22.481.864.413,00	97,44
		Jumlah	153.861.131.300	143.531.045.996	93,29
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	6.742.442.000	6.649.534.756,73	98,62
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	19.781.560.000,00	19.282.897.826,00	97,48
		Jumlah	26.524.002.000,00	25.932.432.582,73	97,77
8	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	62.130.000.000	55.158.000.000,00	88,78
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	7.250.000.000	7.202.241.990,00	99,34
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	3.000.000.000,00	2.911.613.300,00	97,05
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	3.478.230.000	3.252.553.900,00	93,51

LAPORAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Mimika
Tahun 2025



No	Sasaran Strategis	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
		Jumlah	75.858.230.000	68.524.409.190	90,33
9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman, perhubungan dan perekonomian	Program Kawasan Permukiman	3.121.106.500	2.896.111.050,00	92,79
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	4.000.000.000	1.515.241.299,00	37,88
		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1.763.259.800,00	1.568.526.077,00	88,96
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	19.900.000.000	13.696.293.800,00	68,83
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	66.061.176.178	56.977.921.366,00	86,25
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	37.339.456.416	15.378.367.144,00	41,19
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	80.806.565.600	46.276.291.900,00	57,27
		Program Pengembangan Perumahan	11.936.363.655	8.317.038.369,00	69,68
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	27.159.536.837	25.810.897.980,04	95,03
		Program Penyelenggaraan Jalan	461.288.826.511	171.557.710.172,00	37,19
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Laju)	54.092.649.346	52.630.914.003,92	97,30
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	12.928.252.500	6.114.089.079,00	47,29
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	24.930.966.800,00	17.070.178.372,00	68,47
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	952.750.000	680.328.828,00	71,41
		Jumlah	806.280.910.143	420.489.909.440	52,15
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	702.000.000	702.000.000,00	100,00
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	213.000.000	213.000.000,00	100,00
		Program Pengelolaan Persampahan	49.365.917.200	41.440.628.312,00	83,95
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	304.275.000	299.525.000,00	98,44
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	1.217.444.000,00	93,65
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	302.180.000	291.880.000,00	96,59
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	350.000.000	345.000.000,00	98,57
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	500.000.000	345.659.000,00	69,13
		Jumlah	53.037.372.200	44.855.136.312	84,57
11	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	137.951.945.650	99.881.400.835,00	72,40
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9.111.326.400	8.486.769.608,00	93,15
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	219.217.902.690	207.782.918.298,00	94,78
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	5.718.455.000,00	4.633.699.517,00	81,03
		Program Pengelolaan Arsip	2.642.899.700	2.611.725.726,00	98,82

LAPORAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Mimika
Tahun 2025



No	Sasaran Strategis	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.341.921.973	7.230.032.694,00	86,67
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	481.911.812.343,00	448.005.837.126,00	92,96
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	19.409.948.500	18.248.420.961,00	94,02
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.681.932.376.270	2.284.250.912.447,88	85,17
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	23.196.405.475	22.992.882.515,00	99,12
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	9.179.464.000	7.068.396.179,00	77,00
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	700.000.000,00	670.936.560,00	95,85
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	565.000.000	486.548.280,00	86,11
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.844.495.350	7.842.449.450,00	99,97
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	14.788.010.850	13.351.277.288,00	90,28
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	300.000.000	292.354.720,00	97,45
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	15.313.841.000,00	12.423.539.137,00	81,13
		Jumlah	3.638.125.805.200,60	3.146.260.101.341,88	86,48
12	Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Program Kepegawaian Daerah	18.784.580.700	15.096.165.246,00	80,36
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.151.588.700	6.015.310.016,00	97,78
		Jumlah	24.936.169.400	21.111.475.262	84,66
13	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Program Pencatatan Sipil	3.450.000.000	3.177.024.286,00	92,09
		Program Pendaftaran Penduduk	4.255.677.200,00	3.905.238.509,00	91,77
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.900.000.000	3.653.808.187,00	93,69
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1.800.000.000	1.632.466.951,00	90,69
		Jumlah	13.405.677.200	12.368.537.933	92,26
14	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	Program Hubungan Industrial	5.007.438.500	4.980.428.326,00	99,46
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	6.283.516.000	5.924.360.145,00	94,28
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	34.369.500.000	34.356.932.979,19	99,96
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	8.964.792.000,00	7.918.062.865,00	88,32
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	500.000.000	498.766.675,00	99,75
		Program Pengembangan Ukm	9.300.000.000	9.065.021.320,00	97,47
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	260.000.000	255.351.160,00	98,21
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	700.000.000	308.067.600,00	44,01
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	400.000.000	395.664.510,00	98,92
		Jumlah	65.785.246.500	63.702.655.580	96,83
15	Meningkatnya kesempatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	51.900.000.000	48.577.739.593,00	93,60
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.000.000.000	944.187.945,00	94,42

LAPORAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Mimika
Tahun 2025



No	Sasaran Strategis	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	600.000.000,00	579.882.541,00	96,65
		Jumlah	53.500.000.000,00	50.101.810.079,00	93,65
16	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.986.955.000	2.827.320.091,00	94,66
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	350.050.000	311.394.866,00	88,96
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.148.819.000	1.928.813.225,00	89,76
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.100.000.000	1.006.174.755,00	91,47
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	3.124.278.600	708.940.000,00	22,69
		Program Promosi Penanaman Modal	1.699.997.000,00	1.675.878.488,00	98,58
		Jumlah	11.410.099.600,00	8.458.521.425,00	74,13
17	Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	3.206.208.000,00	3.170.128.254,00	98,87
		Program Pemasaran Pariwisata	2.300.000.000,00	2.298.642.000,00	99,94
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	18.746.478.500,00	18.577.444.668,00	99,10
		Program Pengembangan Ekspor	625.000.000,00	617.140.424,00	98,74
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	37.599.088.740,00	36.969.751.306,00	98,33
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.751.515.000,00	4.523.909.000,00	67,01
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
		Program Pengembangan Kebudayaan	26.828.733.000,00	25.722.194.710,00	95,88
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.749.999.950,00	2.682.045.710,00	97,53
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	358.975.000,00	323.326.400,00	90,07
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.628.590.000,00	5.475.073.588,00	97,27
		Jumlah	105.294.588.190,00	100.859.656.060,00	95,79
18	Meningkatnya akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.000.000.000,00	4.741.337.133,00	94,83
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	800.000.000,00	799.700.000,00	99,96
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	68.928.029.350,00	68.900.201.552,00	99,96
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.861.503.675,00	2.855.653.850,00	99,80
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	750.000.000,00	715.901.300,00	95,45
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	5.235.148.000,00	5.005.978.804,00	95,62
		Program Pembinaan Perpustakaan	3.965.727.000,00	3.768.038.683,76	95,02
		Program Penanganan Bencana	4.230.130.000,00	4.131.989.606,00	97,68
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	3.200.000.000,00	3.144.549.973,00	98,27
		Program Penanggulangan Bencana	39.929.941.418,00	33.340.138.691,19	83,50
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	500.000.000,00	498.745.600,00	99,75
		Program Pengelolaan Pelayaran	75.434.045.424,00	70.551.017.122,55	93,53
		Program Pengelolaan Penerbangan	259.513.081.026,00	197.733.378.610,00	76,19



No	Sasaran Strategis	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	12.805.555.720,00	9.824.261.059,00	76,72
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	14.447.494.325,00	14.069.326.410,00	97,38
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	300.000.000,00	298.616.350,00	99,54
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.100.000.000,00	1.091.939.652,00	99,27
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	850.000.000,00	832.851.446,00	97,98
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	12.778.710.400,00	12.727.902.879,00	99,60
		Program Pengendalian Penduduk	2.387.296.000,00	2.334.358.245,00	97,78
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	6.339.311.435,00	6.169.934.338,00	97,33
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	11.245.022.000,00	10.806.454.161,81	96,10
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	39.211.747.885,00	37.792.391.233,00	96,38
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	81.118.610.310,00	72.737.442.412,00	89,67
		Program Penyuluhan Pertanian	7.458.336.000,00	6.216.080.780,00	83,34
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	8.359.446.600,00	8.169.642.922,00	97,73
		Program Perizinan Usaha Pertanian	204.557.000,00	197.511.614,00	96,56
		Jumlah	668.953.693.568,00	579.455.344.427,31	86,62
		Total	6.795.964.066.150,60	5.406.849.065.407,53	79,56

3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2025

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 dianalisis dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal. Berdasarkan hasil pengukuran, sebagian sasaran menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, yaitu ketika capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran yang digunakan.

Efisiensi penggunaan sumber daya Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar negatif 37,10 pada tahun 2025.

Sasaran menurunnya tingkat kemiskinan menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik. Realisasi anggaran pada sasaran ini mencapai 93,29%, sementara capaian indikator kinerja sebesar 170,07%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 76,79%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan mampu melampaui target yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang relatif efisien.

Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, realisasi anggaran tercatat sebesar 84,57% dengan capaian indikator kinerja 103,49%, sehingga menghasilkan efisiensi sebesar 18,92%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja lingkungan hidup dapat dicapai bahkan melebihi target yang ditetapkan, dengan pemanfaatan anggaran yang relatif lebih rendah dari pagu yang tersedia.



Selanjutnya pada sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi, realisasi anggaran mencapai 86,48% dengan capaian indikator kinerja 95,18%, sehingga menghasilkan efisiensi sebesar 8,70%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas pemerintahan telah berjalan cukup efektif dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa sasaran yang menunjukkan nilai efisiensi negatif. Pada sasaran meningkatnya kesempatan kerja, realisasi anggaran mencapai 93,65%, sementara capaian indikator kinerja sebesar 90,58%, sehingga menghasilkan efisiensi sebesar -3,07%. Selain itu, pada sasaran meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN, realisasi anggaran sebesar 74,13% dengan capaian indikator kinerja hanya 40,71%, sehingga menghasilkan efisiensi sebesar -33,42%. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil kinerja yang dicapai masih belum sebanding dengan penggunaan anggaran yang telah direalisasikan.

Sementara itu, pada sasaran meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan, indikator kinerja yang digunakan mencakup sektor pertanian dan perdagangan. Pada sektor pertanian tercatat capaian indikator sebesar -708,00% dengan efisiensi -612,21%, sedangkan pada sektor perdagangan capaian indikator sebesar 44,75% dengan efisiensi -51,04%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran cukup tinggi yaitu 95,79%, namun capaian indikator kinerja sektor unggulan belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa sebagian sasaran strategis telah mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien. Namun demikian, beberapa sasaran masih menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan program, strategi pelaksanaan, serta efektivitas penggunaan anggaran pada periode pembangunan berikutnya.

Tabel 3.4.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kabupaten Mimika Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		Capaian (%)	Capaian Indikator Kinerja (%)	Efisiensi (%)
			Anggaran	Realisasi			
1	Meningkatnya pemerataan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	414.877.220.017,00	323.846.568.229,80	78,06	89,30	11,24
2	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	637.089.280.882,00	352.789.656.499,66	55,38	52,84	-2,54
3	Meningkatkan daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	14.291.604.200,00	12.948.434.988,00	90,6	71,11	-19,49
4	Meningkatnya pengetahuan TIK masyarakat	IP TIK	26.418.799.050,00	25.314.631.208,00	95,82	63,69	-32,13
5	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	IPG	6.314.236.700,00	6.298.738.853,00	99,75	72,39	-27,36

LAPORAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Mimika
Tahun 2025



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		Capaian (%)	Capaian Indikator Kinerja (%)	Efisiensi (%)
			Anggaran	Realisasi			
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	153.861.131.300,00	143.531.045.996,00	93,29	170,07	76,78
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	Angka Kriminalitas	26.524.002.000,00	25.932.432.582,73	97,77	95,65	-2,12
8	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Indeks Gotong Royong	75.858.230.000,00	68.524.409.190,00	90,33	87,93	-2,40
		Indeks Rasa Aman				82,61	82,61
		Indeks Toleransi				94,83	94,83
9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman, perhubungan dan perekonomian	Rasio Infrastruktur berfungsi baik	806.280.910.143,00	420.489.909.439,96	52,15	84,61	32,46
		Rasio ketersediaan Infrastruktur				87,43	87,43
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	53.037.372.200,00	44.855.136.312,00	84,57	103,49	18,92
11	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	3.638.125.805.200,60	3.146.260.101.341,88	86,48	95,18	8,70
		Indeks Reformasi Birokrasi				56,97	56,97
12	Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas Aparatur	24.936.169.400,00	21.111.475.262,00	84,66	76,05	-8,61
13	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM	13.405.677.200,00	12.368.537.933,00	92,26	85,00	-7,26
14	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	Tingkat pendapatan masyarakat per kapita	65.785.246.500,00	63.702.655.580,19	96,83	102,80	5,97
15	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran kerja	53.500.000.000,00	50.101.810.079,00	93,65	110,38	-3,07
16	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi (PMDN/PMA)	11.410.099.600,00	8.458.521.425,00	74,13	40,71	-33,42
17	Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian & perdagangan	105.294.588.190,00	100.859.656.060,00	95,79	Pertanian:	
						-708	-612,21
						Perdagangan:	
						44,75	-51,04

LAPORAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Mimika
Tahun 2025



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		Capaian (%)	Capaian Indikator Kinerja (%)	Efisiensi (%)
			Anggaran	Realisasi			
18	Meningkatnya akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir	Pertumbuhan sentra ekonomi pedalaman dan pesisir	668.953.693.568,00	579.455.344.427,31	86,62	65,00	-21,62
Efisiensi					86,01	48,90	-37,10

BAB 4

Penutup





4.1. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki sasaran strategis sebanyak 18 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 22 indikator. Sebagian besar indikator berada pada kategori Baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang berada pada kategori Butuh Perbaikan, Kurang, dan Sangat Kurang yang memerlukan perhatian dan peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya. **Terdapat 4 indikator dengan predikat Istimewa**, yang menunjukkan kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, terdapat **9 indikator dengan predikat Baik**, yang menandakan bahwa kinerja yang dicapai telah sesuai atau mendekati target yang direncanakan. Selain itu, terdapat **5 indikator dengan predikat Butuh Perbaikan**, yang mengindikasikan bahwa capaian kinerja masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai target yang diharapkan. Sementara itu, **terdapat 4 indikator dengan predikat Kurang**, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja masih cukup jauh dari target yang telah ditetapkan. Adapun **1 indikator berpredikat Sangat Kurang**, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja masih sangat rendah sehingga memerlukan perhatian dan upaya perbaikan yang lebih intensif pada periode perencanaan berikutnya. Berikut ini merupakan capaian kinerja per masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2025:

- 1) Indeks Kesehatan sebagai indikator sasaran meningkatnya pemerataan kualitas kesehatan masyarakat pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **89,30 persen dan berpredikat Baik**.
- 2) Indeks Pendidikan sebagai indikator sasaran meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan masyarakat pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **52,84 persen dan berpredikat Kurang**.
- 3) Indeks Pengeluaran sebagai indikator sasaran meningkatnya daya beli masyarakat pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **71,11 persen dan berpredikat Butuh Perbaikan**.
- 4) IP TIK sebagai indikator sasaran meningkatnya pengetahuan TIK masyarakat pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **63,69 persen dan berpredikat Butuh Perbaikan**.
- 5) Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai indikator sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **72,39 persen dan berpredikat Butuh Perbaikan**.
- 6) Angka Kemiskinan sebagai indikator sasaran menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **170,07 persen dan berpredikat Istimewa**.
- 7) Angka Kriminalitas sebagai indikator sasaran meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **95,65 persen dan berpredikat Baik**.
- 8) Indeks Gotong Royong sebagai indikator sasaran meningkatnya kerukunan hidup masyarakat pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **87,93 persen dan berpredikat Baik**.
- 9) Indeks Rasa Aman sebagai indikator sasaran meningkatnya kerukunan hidup masyarakat pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **82,61 persen dan berpredikat Baik**.
- 10) Indeks Toleransi sebagai indikator sasaran meningkatnya kerukunan hidup masyarakat pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **94,83 persen dan berpredikat Baik**.
- 11) Rasio Infrastruktur Berfungsi Baik sebagai indikator sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman, perhubungan, dan perekonomian



- pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **84,61 persen dan berpredikat Baik.**
- 12) Rasio Ketersediaan Infrastruktur sebagai indikator sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman, perhubungan, dan perekonomian pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **87,43 persen dan berpredikat Baik.**
 - 13) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **103,49 persen dan berpredikat Istimewa.**
 - 14) Nilai SAKIP sebagai indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **95,18 persen dan berpredikat Baik.**
 - 15) Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **56,97 persen dan berpredikat Kurang.**
 - 16) Indeks Profesionalitas Aparatur sebagai indikator sasaran meningkatnya profesionalitas pegawai pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **76,05 persen dan berpredikat Butuh Perbaikan.**
 - 17) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **85,00 persen dan berpredikat Baik.**
 - 18) Tingkat Pendapatan Masyarakat Per Kapita sebagai indikator sasaran menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **102,80 persen dan berpredikat Istimewa.**
 - 19) Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai indikator sasaran meningkatnya kesempatan kerja pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **110,37 persen dan berpredikat Istimewa.**
 - 20) Nilai Investasi (PMDN/PMA) sebagai indikator sasaran meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **40,71 persen dan berpredikat Kurang.**
 - 21) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian sebagai indikator sasaran meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **-708 persen dan berpredikat Sangat Kurang.** Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan sebagai indikator sasaran meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **44,75 persen dan berpredikat Kurang.**
 - 22) Pertumbuhan Sentra Ekonomi Pedalaman dan Pesisir sebagai indikator sasaran meningkatnya akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir pada tahun 2025 memiliki capaian kinerja sebesar **65,00 persen dan berpredikat Butuh Perbaikan.**

Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki **capaian nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 34,82 atau berpredikat kurang.** Artinya, tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika masih memerlukan perbaikan secara menyeluruh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja organisasi belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pembangunan daerah.



Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian 18 sasaran strategis sebesar Rp6.795.964.066.150,60 dengan realisasi sebesar Rp5.406.849.065.407,53 **atau sebesar 79,56%**. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar program telah dilaksanakan, meskipun masih terdapat beberapa sasaran dengan tingkat realisasi yang relatif rendah sehingga mempengaruhi capaian keseluruhan. Berikut ini merupakan capaian anggaran per sasaran tahun 2025:

- 1) Sasaran meningkatnya pemerataan kualitas kesehatan masyarakat memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 78,06 persen.
- 2) Sasaran meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan masyarakat memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 55,38 persen.
- 3) Sasaran meningkatkan daya beli masyarakat memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 90,60 persen.
- 4) Sasaran meningkatnya pengetahuan TIK masyarakat memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 95,82 persen.
- 5) Sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 99,75 persen.
- 6) Sasaran menurunnya tingkat kemiskinan memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 93,29 persen.
- 7) Sasaran meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 97,77 persen.
- 8) Sasaran meningkatnya kerukunan hidup masyarakat memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 90,33 persen.
- 9) Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman, perhubungan dan perekonomian memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 52,15 persen.
- 10) Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 84,57 persen.
- 11) Sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 86,48 persen.
- 12) Sasaran meningkatnya profesionalitas pegawai memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 84,66 persen.
- 13) Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 92,26 persen.
- 14) Sasaran menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 96,83 persen.
- 15) Sasaran meningkatnya kesempatan kerja memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 93,65 persen.
- 16) Sasaran meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 74,13 persen.
- 17) Sasaran meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 95,79 persen.
- 18) Sasaran meningkatnya akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir memiliki persentase realisasi anggaran sebesar 86,62 persen.

Efisiensi penggunaan sumber daya Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar **negatif 37,10 pada tahun 2025**. Nilai efisiensi yang negatif tersebut menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sumber daya, khususnya anggaran, relatif lebih besar dibandingkan dengan



capaian kinerja yang dihasilkan, sehingga efisiensi penyelenggaraan program dan kegiatan belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar program telah dilaksanakan dan anggaran telah direalisasikan dalam jumlah yang cukup besar, peningkatan capaian kinerja belum sepenuhnya sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut antara lain belum optimalnya efektivitas pelaksanaan program, ketidakseimbangan antara besaran alokasi anggaran dengan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja, serta masih adanya kegiatan yang berorientasi pada penyerapan anggaran namun belum memberikan dampak signifikan terhadap hasil pembangunan. Selain itu, terdapat beberapa sasaran strategis yang memiliki realisasi anggaran tinggi namun capaian kinerja masih berada pada kategori butuh perbaikan atau kurang, sehingga turut mempengaruhi tingkat efisiensi secara keseluruhan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2025, terdapat beberapa saran perbaikan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika ke depan diantaranya:

- 1) Memperkuat kualitas perencanaan kinerja dan penganggaran dengan memastikan keterkaitan yang lebih kuat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga seluruh kegiatan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama.
- 2) Meningkatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) agar alokasi anggaran lebih berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak pembangunan, bukan hanya pada penyerapan anggaran.
- 3) Melakukan fokus perbaikan pada indikator yang berpredikat Butuh Perbaikan, Kurang, dan Sangat Kurang, khususnya pada indikator pendidikan, investasi, reformasi birokrasi, profesionalitas aparatur, daya beli masyarakat, serta pertumbuhan sektor unggulan.
- 4) Memperkuat strategi pengembangan sektor ekonomi unggulan, terutama sektor pertanian dan perdagangan, melalui peningkatan produktivitas, penguatan rantai pasok, pengembangan hilirisasi komoditas, serta peningkatan akses pasar.
- 5) Meningkatkan daya tarik investasi daerah dengan memperbaiki iklim investasi, penyederhanaan perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung, serta promosi potensi investasi daerah secara lebih aktif.
- 6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan, literasi teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi aparatur guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
- 7) Memperkuat implementasi reformasi birokrasi dan SAKIP, melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja yang lebih akurat, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.
- 8) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, dengan melakukan evaluasi berkala terhadap program yang memiliki realisasi anggaran tinggi tetapi kontribusi kinerjanya rendah.
- 9) Mengoptimalkan pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran, sehingga realisasi anggaran dapat lebih merata dan mendukung percepatan pencapaian target pembangunan.
- 10) Meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan agar tidak terjadi duplikasi kegiatan serta dapat menghasilkan dampak pembangunan yang lebih signifikan.



- 11) Memperkuat sistem evaluasi kinerja berbasis data, termasuk pemanfaatan data statistik yang lebih akurat dan mutakhir untuk mendukung pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
- 12) Mendorong inovasi daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan, sehingga program yang dilaksanakan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Jabatan : PJ.BUPATI MIMIKA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Timika, 31 Januari 2025

PJ. BUPATI MIMIKA,

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN, S.H,M.M

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pemerataan kualitas Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	indeks	83,0
2	Meningkatnya pemerataan kualitas Pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	Indeks	21,16
3	Meningkatkan daya beli masyarakat	Indeks pengeluaran	Indeks	24,4
4	Meningkatnya Pengetahuan TIK masyarakat	IP TIK	Jumlah	24,785
5	Meningkatnya Pengarustamaan Gender dalam pembangunan	IPG	Indeks	13,4
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	Persen	23,3
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	Angka Kriminalitas	Kasus	440
8	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Indeks Gotong Royong	Indeks	0,58
		Indeks rasa aman	Indeks	0,69
		Indeks Toleransi	Indeks	0,58
9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman, perhubungan dan perekonomian	Rasio Infrastruktur berfungsi baik	Persen	51
		Rasio ketersediaan Infrastruktur	Persen	70
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	Persen	85
11	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	Predikat	B
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78
12	Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks	95
13	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM	Predikat	A

14	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	Tingkat pendapatan masyarakat perkapita	Rp juta/kapita	30.400.000
15	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran kerja	Persen	7,45
16	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Rp. Trilyun	70
17	Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sector unggulan	Persentase pertumbuhan PDRB sector pertanian & Perdagangan	Persen	Pertanian :0,50 Perdagangan : 4
18	Meningkatnya akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir	Pertumbuhan sentra ekonomi pedalaman dan pesisir	Persen	1



Timika, 31 Januari 2025

PJ. BUPATI MIMIKA,

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN, S.H,M.M



Pemerintah Kabupaten Mimika